



**KRISIS EKONOMI DAN TUNTUTAN DEMOKRATISASI
DI VENEZUELA**

ECONOMIC CRISIS AND DEMOCRATIZATION DEMAND IN VENEZUELA

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

**Mochammad Andi Saputra
120910101057**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

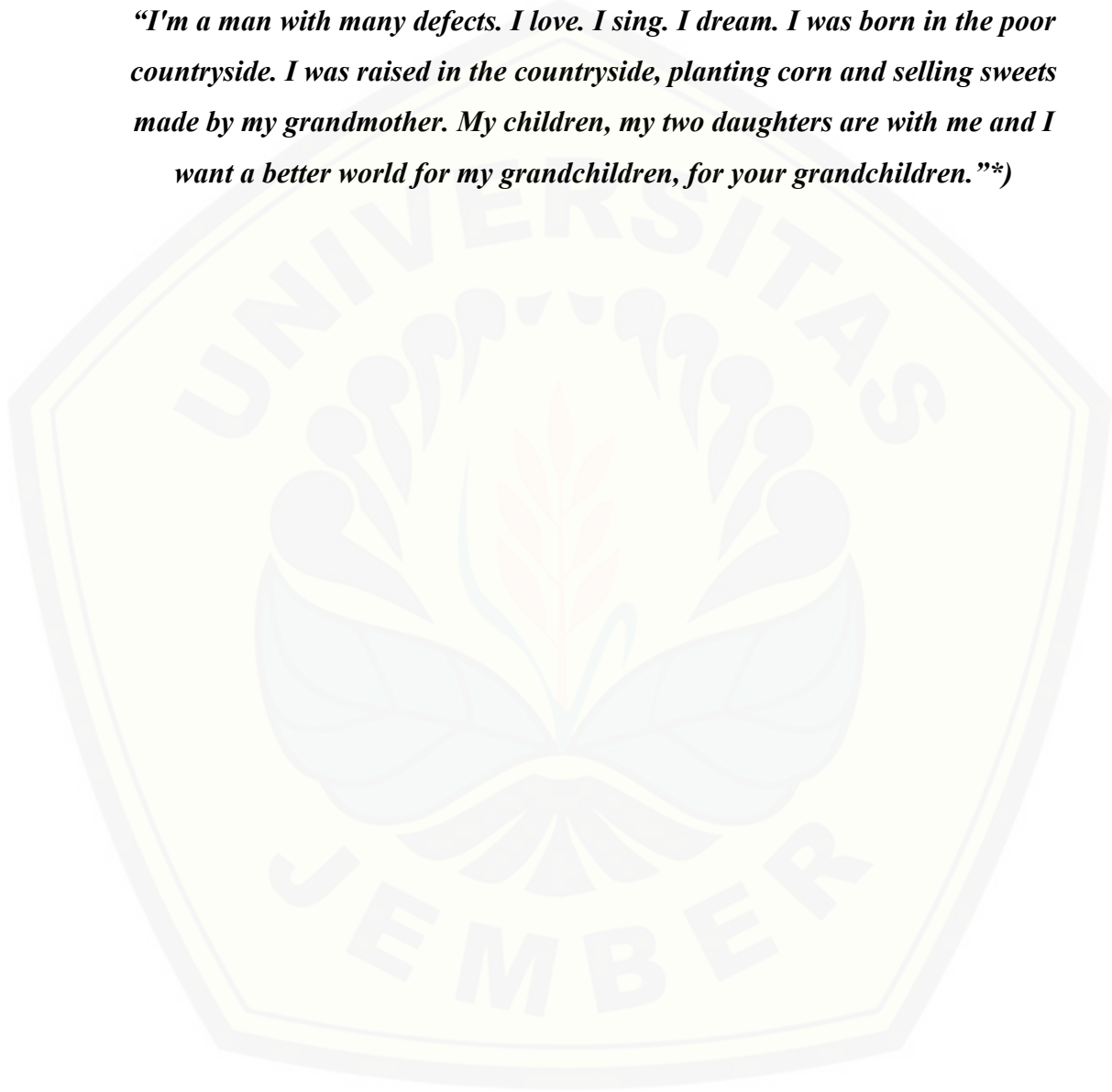
PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ibunda Hozzaimah, dan ayahanda Suyitno. Karena dukungan beserta doa-doa mereka akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik saya, Mochammad Zulkifli Dwi Putra dan Mochammad Nuril Huda.
3. Miranda Dyah Paramudhita yang selalu mensupport dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater yang penulis banggakan, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

MOTO

“I’m a man with many defects. I love. I sing. I dream. I was born in the poor countryside. I was raised in the countryside, planting corn and selling sweets made by my grandmother. My children, my two daughters are with me and I want a better world for my grandchildren, for your grandchildren.”)*



*) Hugo Chavez, Pendiri rezim sosialis di Venezuela

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Andi Saputra

NIM : 120910101057

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “Krisis Ekonomi dan Tuntutan Demokratisasi di Venezuela” merupakan hasil karya sendiri, menggunakan kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan bukan karya plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi dari karya ilmiah ini dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bukti dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Desember 2017

Yang menyatakan

Mochammad Andi Saputra

NIM. 120910101057

SKRIPSI

**KRISIS EKONOMI DAN TUNTUTAN DEMOKRATISASI
DI VENEZUELA**

**ECONOMIC CRISIS AND DEMOCRATIZATION DEMAND
IN VENEZUELA**

SKRIPSI

Oleh:

Mochammad Andi Saputra

NIM: 120910101057

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Puji Wahono, M.Si

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Krisis Ekonomi Dan Dinamika Politik Di Venezuela”
telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Desember 2017

Tempat : Ruang LKPK, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Anggota I

Agus Trihartono, S. Sos, MA., Ph.D

NIP. 196908151995121001

Dr. Sunardi Purwaatmoko, MIS

NIP. 196010151989031002

Anggota II

Anggota III

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M. Si, Ph.D

NIP. 196802291998031001

Dr. Puji Wahono, M.Si

NIP. 196002011987021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M. Si.
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

KRISIS EKONOMI DAN TUNTUTAN DEMOKRATISASI DI VENEZUELA; Mochammad Andi Saputra; 120910101057; 103 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Hugo Chavez membawa Venezuela menjadi negara sosialis setelah dia membentuk Konstitusi Bolivarian tahun 1999. Konstitusi tersebut semakin melemahkan fungsi dari lembaga-lembaga demokratis yang ada di Venezuela. Presiden selaku Eksekutif memiliki kekuasaan yang hampir mutlak dalam pemerintahan karena dia menguasai lembaga peradilan, dewan pemilihan nasional, serta lembaga legislatif yang ada disana. Pencederaan terhadap nilai-nilai demokrasi juga banyak dilakukan pemerintah mulai dari pelanggaran terhadap hak-hak dasar hingga pelaksanaan pemilu yang dianggap tidak transparan. Walaupun demikian, masyarakat cenderung tidak melakukan protes karena mereka merasakan program-program sosial yang dikeluarkan pemerintah. Harga minyak yang sangat tinggi pada waktu itu membuat program-program sosial tersebut dapat terlaksana. Keuntungan yang mereka rasakan mendorong pemerintah berusaha meningkatkan produksi minyaknya hingga membuat mereka semakin bergantung terhadap sumberdaya alam tersebut.

Namun, penurunan harga minyak dunia yang terjadi pada tahun 2014 akhirnya membawa Venezuela mengalami permasalahan dalam perekonomiannya. Ketergantungannya terhadap minyak membuat mereka mengalami krisis ekonomi yang kemudian berdampak terhadap berbagai sektor. Kejahatan yang semakin meningkat sebagai salah satu dampak dari krisis ekonomi memunculkan terjadinya protes dari kalangan mahasiswa yang awalnya hanya di salah satu negara bagian Venezuela. Mereka menuntut agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan ekonomi yang terjadi di Venezuela agar kejahatan tidak semakin berkembang. Namun, sikap dari aparat yang menanggapi protes dengan kekerasan membuat penentangan terhadap pemerintah semakin

meluas. Tuntutan para pemrotes akhirnya semakin meluas tidak hanya perbaikan ekonomi namun mereka juga menuntut untuk demokrasi di Venezuela. Hal tersebut membuat masa depan rezim sosialis menjadi terancam.

Penulis kemudian menyusun penelitian ini untuk menganalisis peluang runtuhnya rezim sosialis di Venezuela yang nantinya akan memberikan kesempatan untuk terjadinya demokratisasi. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang didapat kemudian dianalisis dan disusun untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa rezim sosialis di Venezuela sedang mengalami permasalahan yang sangat genting. Konflik terjadi di internal pemerintahan, yang dimulai sejak meninggalnya tokoh utama mereka yaitu Hugo Chavez. Kesetiaan dari Chavismo sebagai pendukung utama rezim ini juga semakin berkurang karena ketidakmampuan pemerintah menangani permasalahan ekonomi yang terjadi. Hal tersebut membuat rezim ini mengalami kekalahan pertamanya dalam pemilu legislatif tahun 2015. Rezim sosialis di Venezuela juga mendapatkan tekanan dari berbagai pihak terutama dari kelompok oposisi yang memanfaatkan isu krisis ekonomi yang terjadi. Penggunaan militer untuk mengontrol protes terhadap pemerintah membuat permasalahan baru muncul yaitu krisis kemanusiaan yang kemudian memancing kecaman dari dunia internasional. Akhirnya pemerintah kesulitan mendapatkan bantuan pendanaan untuk menyelesaikan krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Legitimasi pemerintah semakin menurun karena kondisi yang terjadi saat ini sehingga hal tersebut semakin berpotensi untuk membuat rezim sosialis di Venezuela mengalami keruntuhan.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allh Swt. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Krisis Ekonomi Dan Tuntutan Demokratisasi di Venezuela”. Skripsi ini disusun penulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
2. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D. selaku dosen pembimbing utama dan Dr. Puji Wahono, M.Si selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan terhadap penyusunan skripsi ini.
3. Saudari ayyak yang telah memberikan sumbangsi ide untuk isu yang diangkat dalam skripsi ini.
4. Keluarga besar MNMA: Yery Bagus Iman, Adhytia Pahlawan, Ganda Atmaja, Pranata Dwi Kusuma, Januar Tri Raharjo, Nur Ardi Setiawan, Firdaus Amir, Sahrian Arif Setiawan, Renza Elma Pramitha, Bertha Viqie Llorentya, Mirna Ardiyanti Pratama, Tri Indah Oktavianti, dan Anifa Ludfiani, terima kasih telah berbagi kebahagiaan dan menjadi ruang untuk berkeluh kesah tentang permasalahan skripsi yang dihadapi.
5. Ulfa, Dana, Bos Lukimin, Rahma, serta teman-teman lain yang menjadi tempat untuk berdiskusi.
6. Keluarga HI Joyo Wae 2012 yang selalu “*biskolobis*”.
7. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTO	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASANvii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup pembahasan.....	4
1.2.1. Batasan Materi	4
1.2.2. Batasan Waktu	5
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Kerangka Dasar Penelitian	6
1.6. Argumen Utama.....	10
1.7. Metodologi Penelitian.....	10
1.7.1. Metode Pengumpulan Data	11
1.7.2. Teknik Analisis Data.....	11
1.8. Sistematika Penulisan	12
BAB 2. SEJARAH DAN DEMOKRASI SEMU REZIM SOSIALIS VENEZUELA	13

2.1.....	
Perjalanan Hugo Chavez Menjadi Presiden Venezuela.....	13
2.2.....	
Realisasi Semangat Revolusi Bolivarian Hugo Chavez	17
2.2.1. Pembentukan Konstitusi 1999.....	17
2.2.2. Kebijakan Ekonomi.....	19
2.2.3. Kebijakan Sosial.....	21
2.2.4. Kebijakan Dalam Hubungan Internasional.....	26
2.3.....	
Upaya Menentang Pemerintahan Hugo Chavez.....	27
2.3.1. Kudeta Tahun 2002.....	27
2.3.2. Referendum.....	29
2.4.. Demokrasi Semu Ala Rezim Sosialis Venezuela.....	33
BAB 3. KRISIS EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP BERBAGAI SEKTOR.....	43
3.1. Krisis Ekonomi.....	43
3.1.1. Penurunan PDB Venezuela.....	44
3.1.2. Meningkatnya Inflasi Dan Menurunnya Nilai Tukar.....	45
3.1.3. Meningkatnya Hutang.....	47
3.1.4. Menipisnya Devisa Negara.....	49
3.2. Penyebab Krisis Ekonomi Di Venezuela.....	50
3.2.1. Kontrol Perekonomian Dan Korupsi Yang Tinggi.....	50
3.2.2. Instabilitas Politik.....	52
3.2.3. Krisis Listrik.....	53
3.2.4. Krisis Makanan Dan Obat.....	54
3.3. Dampak Krisis Ekonomi.....	55
3.3.1. Krisis Kemanusiaan.....	55
3.3.2. Kekacauan Politik.....	63

BAB 4. ANALISIS PROSPEK TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DI VENEZUELA.....	65
4.1. Melemahnya Pemerintahan Sosialis.....	65
4.1.1. Konflik Internal Di Pemerintahan.....	65
4.1.2. Menurunnya Kesetiaan Chavismo Di Kalangan Sipil.....	67
4.1.3. Tekanan Dari Berbagai Pihak.....	68
4.2. Dimensi Internasional Dalam Keberlangsungan Rezim Sosialis Di Venezuela.....	76
4.2.1. Kelompok Penekan Pemerintah.....	76
4.2.2. Perkembangan Dukungan Dari Mitra Utama Venezuela.....	85
BAB 5. KESIMPULAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1: Harga Minyak Dunia

Grafik 3.2: PDB Venezuela

Grafik 3.3: Tingkat Inflasi Di Venezuela

Grafik 3.4: Nilai Tukar Bolivar Terhadap Dollar AS

Grafik 3.5: Produksi Minyak Venezuela

Grafik 3.6: Cadangan Devisa Venezuela

Grafik 3.7: Anggaran Belanja Pemerintah

Grafik 3.8: Upah Minimum Venezuela

Grafik 3.9: Angka Pengangguran Venezuela

Grafik 3.10: Pencari Suaka Venezuela Di AS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 GAM dari Venezuela.



DAFTAR SINGKATAN



IMF	= <i>International Monetary Fund</i>
AS	= <i>Amerika Serikat</i>
BBM	= <i>Bahan Bakar Minyak</i>
MBR-200	= <i>Movimiento Bolivariano Revolucionario 200</i>
MVR	= <i>Movimiento Quinta Republica</i>
AD	= <i>Accion Democratica</i>
COPEI	= <i>Christian Democratic Party</i>
MUD	= <i>Mesa de la Unidad Democrática</i>
CNE	= <i>Consejo Nacional Electoral.</i>
HRW	= <i>Human Right Watch</i>
UNASUR	= <i>Unión de Naciones Suramericanas</i>
OAS	= <i>Organization of American States</i>

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan industri modern mendukung perkembangan Venezuela seiring dengan banyaknya ladang minyak yang ditemukan pada tahun 1917. Beberapa wilayah di Venezuela mengandung cadangan minyak yang sangat banyak. Menjelang tahun 1930-an, perekonomian di Venezuela mulai didominasi oleh minyak bumi. Meskipun terdapat emas, bijih besi, dan intan, minyak bumi tetap menjadi penyumbang ekspor terbesar di Venezuela. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia dan memproduksi tiga juta barel minyak per hari (Monaldi, 2015).

Venezuela menganut faham sosialis setelah Hugo Chavez membawa faham tersebut ketika memenangkan pemilu tahun 1998. Dia memenangkan pemilu tersebut dengan strategi populis yang dia bawa. Dia menjanjikan kesejahteraan ketika masyarakat dihimpit kondisi krisis ekonomi. Pendekatan terhadap masyarakat yang memang dimulai dari bawah membuat dia mampu meyakinkan kelompok kelas bawah untuk mendukungnya. Kelompok tersebut mendominasi Venezuela karena kondisi perekonomian negara yang sedang runtuh.

Hugo Chavez kemudian menyusun konstitusi baru pada tahun 1999 yang disebut konstitusi Bolivarian untuk memenuhi janjinya pada masa kampanye. Konstitusi tersebut menjamin kesejahteraan semua masyarakat Venezuela tanpa memandang kelas. Kemudian setelah konstitusi dibentuk, dia mulai mencari cara untuk mendanai tanggung jawab konstitusi yang dia pegang. Nasionalisasi perusahaan asing menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Hugo Chavez. Bagian dari kebijakan nasionalisasi yang dikeluarkan Hugo Chavez yaitu bahwa perusahaan minyak negara Venezuela (PdVSA) harus memiliki saham minimum 51% kemudian dari semua gas dan minyak yang diekstrak dari Venezuela harus memberikan royalti sebesar 30% kepada negara (Andrianto, 2012).

Kebijakan nasionalisasi perusahaan asing yang dikeluarkan oleh Hugo Chavez membuat keuntungan dari penjualan minyak mentah masuk ke devisa negara tersebut. Namun, disisi lain Venezuela mulai bergantung terhadap harga minyak dunia. Harga minyak dunia yang semakin meningkat hingga mencapai US\$ 100 per barel membuat pendapatan Venezuela meningkat. Chavez memutuskan untuk membayar kembali semua hutang Venezuela pada IMF dan Bank dunia dengan keuntungan yang didapat dari ekspor minyak. Pada tahun 1999, Hugo Chavez telah melunasi hutang Venezuela kepada IMF, kemudian dilanjutkan dengan melunasi seluruh hutang kepada Bank Dunia pada tahun 2007. Tenggat waktu Hutang pada Bank Dunia sendiri sebenarnya berlaku hingga tahun 2012. Pelunasan hutang yang dilakukan lima tahun lebih cepat dari tenggat waktu tersebut membuat Venezuela menghemat pembayaran bunga sebesar US\$ 8 juta (Bloomberg, 2010). Kebijakan berhutang kepada IMF menurut Chavez telah menyebabkan inflasi yang sangat tinggi di Venezuela yang juga menimbulkan gerakan protes keras dari rakyat negeri itu. Pada tahun 2006 IMF menutup seluruh kantornya di Venezuela karena tidak ada lagi proyek-proyek dari lembaga tersebut yang beroperasi disana (Ishmael, 2007).

Program-program sosial juga mulai dikeluarkan oleh Hugo Chavez dengan meningkatnya keuangan negara. Dia menjamin kesehatan gratis untuk semua rakyat Venezuela kemudian juga memberikan akses pendidikan bagi orang-orang tidak hingga memberikan tunjangan bagi mereka yang tidak bekerja. Program-program tersebut membuatnya semakin populer dan mampu memenangkan kembali pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2006. Pemilu-pemilu di daerah juga dimenangkan oleh koalisi partai yang dia dirikan.

Hugo Chavez akhirnya meninggal pada tahun 2012 karena sakit yang dialaminya setelah sebelumnya memenangkan pemilu di tahun yang sama. Sepeninggal Hugo Chaves perekonomian Venezuela perlahan mulai tidak stabil karena kehilangan tokoh sentralnya. Kursi pemerintahan pun dilanjutkan oleh Nicholas Maduro. Kemenangan tipis pada pemilu tahun 2013 terhadap partai oposisi menjadikan Nicholas Maduro sebagai presiden di Venezuela. Maduro merupakan wakil dari Hugo Chaves selama memerintah. Dia memiliki arah

pandangan yang sama dengan Hugo Chavez. Dia juga mengatakan kepada masyarakat bahwa berkomitmen untuk melanjutkan semua yang dimulai oleh Hugo Chavez.

Pemerintahan Maduro tidak berjalan dengan mulus karena setelah setahun menjabat, harga minyak mulai tidak stabil sejalan dengan peningkatan produksi minyak yang dilakukan oleh negara-negara pemilik cadangan minyak. Produksi yang sangat banyak tidak seimbang dengan permintaan akan minyak yang semakin berkurang. Harga minyakpun mulai jatuh pada tahun 2014 hingga mencapai harga terendah pada awal tahun 2016 mendekati 20 US\$ per barel (Tradingeconomics, 2017). Kondisi tersebut memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap Venezuela. Penurunan pada harga minyak memicu terjadinya krisis ekonomi.

Tanda-tanda terjadinya krisis ekonomi di Venezuela mulai terlihat bersamaan dengan penurunan harga minyak tersebut. Ketergantungan terhadap produksi minyak yang sangat tinggi membuat negara ini terjebak pada krisis ekonomi. Sebagai komoditas utama penyumbang devisa negara, minyak sangat signifikan memberikan pengaruh terhadap kondisi perekonomian di Venezuela. Tingkat inflasi di negara ini pun mencapai 800 persen dan menjadi tertinggi di dunia. Kondisi perekonomian Venezuela yang tidak stabil tersebut berdampak kepada berbagai sektor. Masyarakat Venezuela banyak yang mengalami kekurangan makanan. Berdasarkan pada perhitungan standar hidup layak yang dibuat oleh Simon Bolivar University sekitar 87 persen warga Venezuela menyatakan bahwa mereka tidak memiliki uang untuk membeli makanan yang layak. Hal tersebut memancing kerusuhan di berbagai wilayah. Sekitar 50 kerusuhan dan unjuk rasa terkait pangan terjadi hanya dalam waktu 2 minggu (Rakhma, 2016).

Kondisi perekonomian yang semakin parah diikuti dengan tuntutan agar Nicholas Maduro Turun dari jabatannya sebagai presiden (BBC, 2017). Pemerintahan di bawah kekuasaan Nicholas Maduro dianggap tidak mampu lagi menjaga stabilitas ekonomi di Venezuela (BBC, 2017). Kecaman yang semakin banyak muncul membuat Maduro memutuskan menggunakan militer untuk

menghentikan demonstrasi yang terjadi. Kekerasanpun dilakukan Maduro untuk menghentikan massa yang semakin banyak.

Upaya Maduro untuk menghentikan massa dengan militer semakin membuat penolakan berdatangan dari hampir semua bagian masyarakat. Protes menuntut demokrasi akhirnya mulai terbangun di negara tersebut. Mereka menuntut kembali hak-hak kebebasan untuk berekspresi. Kecaman juga datang dari berbagai negara terutama Amerika Serikat untuk mendukung demokrasi di Venezuela. Kondisi perekonomian yang semakin memburuk membuat Maduro akhirnya semakin terjepit. Negara-negara tetangga yang menjadi mitra utamanya seperti Brazil dan Kolombia juga mulai menentang pemerintahannya karena takut terkena dampak dari Krisis yang terjadi di Venezuela (Monaldi, 2015).

Hal-hal tersebut diatas membuat penulis berusaha untuk menganalisis kemungkinan runtuhnya rezim sosialis yang ada di Venezuela yang nantinya akan membuka peluang untuk demokratisasi. Penulispun akhirnya memutuskan untuk mengambil judul:

“Krisis Ekonomi Dan Dinamika Politik Di Venezuela”

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Sebuah penelitian membutuhkan ruang lingkup bahasan untuk memfokuskan pada permasalahan yang ingin diteliti. Ruang lingkup pembahasan dapat memberikan arahan yang jelas serta batasan-batasan sehingga tidak keluar dari topik pembahasan dari sebuah penelitian. Batasan-batasan yang digunakan akan menjadi pedoman kerja, sehingga tidak menimbulkan kerancuan kepada para pembaca (Sutrisno, 1984). Dalam penelitian ini penulis menggunakan batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1. Batasan Materi

Penelitian akan menjadi lebih terfokus dengan adanya batasan materi. Pembahasan yang akan dipaparkan menjadi tidak merambat kepada permasalahan lain dengan adanya batasan materi. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan krisis ekonomi kemudian dampak dari krisis

ekonomi yang menyebabkan tuntutan demokratisasi di Venezuela. Setelah itu, Penulis akan meneliti lebih lanjut tentang seberapa besar peluang terjadinya perubahan rezim di Venezuela.

1.2.2. Batasan Waktu

Batasan waktu digunakan oleh penulis agar dapat membatasi jangka waktu permasalahan yang dibahas. Batasan waktu juga memberikan jangkauan yang lebih sistematis terhadap data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penulis memilih rentan waktu dari tahun 2014 sampai bulan Oktober tahun 2017. Tahun 2014 dipilih penulis karena pada waktu tersebut terjadi penurunan harga minyak yang diindikasikan sebagai pemicu dari krisis yang terjadi di Venezuela. Sedangkan bulan Oktober tahun 2017 dipilih penulis untuk mengukur perkembangan gerakan demokratisasi di Venezuela. Penulis tidak menutup kemungkinan akan menggunakan data diluar tahun tersebut apabila berhubungan dengan penelitian ini.

1.3. Rumusan Masalah

Permasalahan menjadi hal dasar yang mendorong adanya sebuah penelitian. Dengan demikian, peneliti harus lebih dulu mengetahui permasalahan yang ingin mereka bahas. The Liang Gie mendefinisikan permasalahan sebagai berikut: “Masalah adalah suatu kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dan memancing untuk adanya pembahasan yang lebih mendalam untuk mengetahui penyebabnya” (Gie, 1979).

Berdasarkan pemaparan tersebut dan latar belakang yang ada diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana kemungkinan jatuhnya rezim sosialis di Venezuela?”

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang jatuhnya rezim sosialis di Venezuela yang akan membuka peluang untuk terjadinya transisi demokrasi,

namun sebelum itu penulis akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan Venezuela terjebak dalam krisis ekonomi.

1.5. Kerangka pemikiran

Krisis ekonomi merupakan suatu istilah dalam teori siklus bisnis yang merujuk pada perubahan tajam menuju resesi.¹ Kehancuran yang terjadi pada keuangan suatu negara mengakibatkan krisis ekonomi. Penurunan Produk Domestik Bruto (PDB), kenaikan harga (inflasi) atau penurunan harga (deflasi), peningkatan hutang negara, dan melemahnya pertumbuhan menjadi tanda-tanda terjadinya sebuah krisis ekonomi. Perubahan pada ekonomi suatu negara dapat menjelma menjadi krisis. Suatu negara dapat mengalami krisis karena faktor-faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar wilayahnya (Siregar, 2010).

Krisis ekonomi adalah suatu keadaan ketika sektor perekonomian suatu negara mengalami keruntuhan atau penurunan yang kemudian mempengaruhi sektor lainnya. Secara sederhana para ahli ekonomi mendefinisikan krisis ekonomi sebagai suatu keadaan ketika pemerintahan sebuah negara tidak dipercaya lagi oleh rakyatnya karena perekonomiannya yang runtuh. Perbankan sudah tidak dipercaya sebagai tempat menyimpan uang oleh masyarakatnya sehingga mereka mengalami kesulitan uang tunai. Karena hal tersebut bank sentralpun harus menalangnya yang menyebabkan uang beredar semakin banyak namun nilainya berkurang (Allen, 2009).

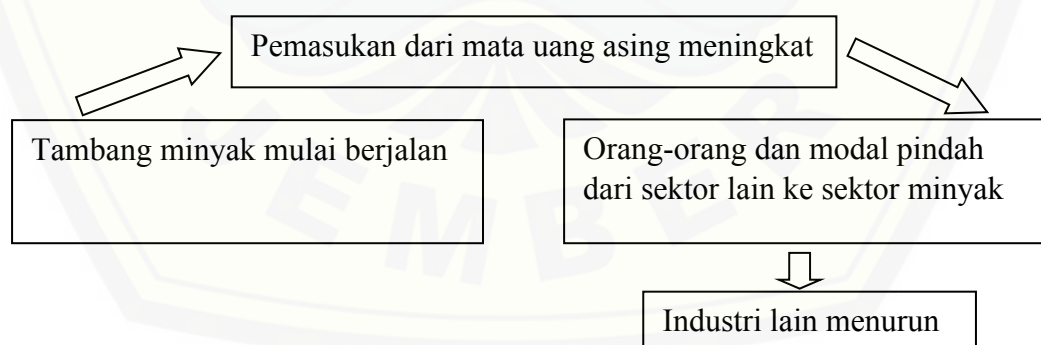
Terdapat dua sifat yang berbeda pada sebuah krisis ekonomi jika dilihat dari proses terjadinya sebuah krisis. Pertama, guncangan ekonomi tak terduga yaitu krisis ekonomi yang secara mendadak muncul tanpa adanya tanda-tanda sebelumnya seperti yang terjadi pada tahun 1974 ketika harga minyak mentah mengalami kenaikan yang sangat besar di pasar Internasional (Allen, 2009). Kedua, krisis ekonomi yang munculdari proses akumulasi yang cukup panjang dan tidak mendadak, seperti krisis ekonomi global pada periode 2008-2009 (Allen, 2009).

¹Dalam KBBI, resesi berarti kelesuan dalam perdagangan dan industri ditandai dengan menurunnya kegiatan pasar.

Krisis ekonomi di suatu Negara atau wilayah bisa berasal dari luar atau dalam negara/wilayah tersebut. Bersumber dari dalam, misalnya penurunan pada suatu komoditas secara mendadak. Di sektor pertanian, misalnya, gagal panen karena perubahan cuaca ekstrim yang tidak terantisipasi sebelumnya. Bersumber dari luar Negara seperti krisis ekonomi global 2008-2009 (terkecuali AS, krisis ini berasal dari dalam) atau krisis minyak pertama pada tahun 1974 atau kedua pada tahun 1979 bagi Negara-negara pengeksplor minyak (Tambunan, 2015).

Richard Auty (1993) menjelaskan dengan teorinya *resource curse* (*kutukan sumberdaya*) bahwa kekayaan alam yang luar biasa tidak dapat serta merta menjadikan negara tersebut menjadi negara yang makmur akan tetapi dapat membuat negara tersebut menjadi rentan terhadap konflik dan juga memunculkan banyak terjadinya korupsi (Auty, 1993). Kekayaan sumber daya alam dapat dan sering memprovokasi terjadinya konflik diantara elit-elitnya untuk berkuasa demi mendapatkan pengaruh yang besar atau menggunakan sumber daya alam untuk membiayai perjuangan mereka (Humphreys, 2007). Sejak tahun 1990, negara-negara penghasil minyak memiliki kemungkinan lebih besar untuk terjadinya perang sipil dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki cadangan minyak lebih sedikit (NRGI, 2015)

Model dutch disease²



Sumber: https://resourcegovernance.org/sites/default/files/nrgi_ResourceCurse.pdf

Model *Dutch disease* dalam teori kutukan sumberdaya juga menjelaskan tentang pengaruh dari peningkatan besar dalam pendapatan sumber daya alam

²Diolah sendiri oleh penulis untuk menggambarkan model dutch disease berdasarkan penjelasan yang ada dalam sumber bacaan.

akan membuat negara cenderung mengalihkan semua modal dari sektor non sumberdaya menuju sektor sumber daya (Neary dan Wijnbergen, 1986). Model tersebut sejalan dengan yang terjadi di Venezuela yang perekonomiannya di dominasi oleh tambang minyak bumi.

Joseph wright (2010) kemudian menjelaskan tentang hubungan antara krisis ekonomi dan demokratisasi dalam tulisannya yang berjudul "*Exit During Crisis: How Openness, Migration, And Economic Crisis Affect Democratization.*" Demokratisasi memiliki kecenderungan dijadikan pilihan sebagai jalan keluar dari krisis ekonomi. Masyarakat berusaha untuk keluar dari kondisi tawar-menawar yang otoriter dan memobilisasi kekuatan untuk melawan diktator. Hubungan dengan barat menjadi komponen kunci dari pengaruh internasional tentang demokratisasi (Wright, 2010). Krisis ekonomi, atau guncangan negatif jangka pendek pada output ekonomi dapat menggoyahkan kediktatoran dan menyebabkan demokratisasi.

Krisis ekonomi memunculkan sejumlah cara untuk menggoyahkan kediktatoran yaitu: 1) Memberikan titik fokus untuk protes oposisi, 2) Menciptakan perpecahan dalam rezim itu sendiri atas respon yang tepat untuk krisis ekonomi atau, 3) Menguras sumber daya yang tersedia karena digunakan oleh rezim berkuasa untuk meminimalisir tekanan yang berasal dari kelompok penentang sehingga menyulitkan untuk kembali melakukan pembangunan (Haggard dan Kaufman, 1995).

Transisi menuju demokrasi diawali dengan jatuhnya rezim otoriter, dan untuk menganalisis peluang jatuhnya rezim di Venezuela, penulis menggunakan Teori *regime survival and fall* (kelangsungan hidup dan kejatuhan rezim). Teori ini menjelaskan tentang bagaimana perubahan dan kelangsungan sebuah rezim. Mereka menempatkan permainan rezim dalam negeri dalam konteks internasional. Teori yang mereka keluarkan berfokus pada kepala pemerintahan, partai politik, militer, organisasi masyarakat sipil, dan gerakan sosial yang terorganisir yang nantinya juga menempatkan pengaruh internasional sebagai aktor tambahan (Scott dan Liñan, 2014).

Teori ini melihat keberlangsungan dari suatu rezim berdasarkan pada tujuan dari dua kubu kuat yaitu kelompok pemerintah dan kelompok penentang. Kasus di Venezuela sendiri memperlihatkan pemerintah yang berusaha mempertahankan pemerintahannya sosialisnya sedangkan kelompok penentang berusaha untuk menuntut demokrasi. Pencetus teori ini melihat bagaimana kebijakan-kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah akan mempengaruhi pandangan/dukungan terhadap suatu rezim politik, dengan kata lain dilihat dari bagaimana cara pemerintah mempertahankan koalisi rezim yang sudah dibentuk. Rezim yang telah lama berkuasa biasanya akan membentuk sebuah ketergantungan, namun hal tersebut dapat berubah (Scott dan Liñan, 2014).

Perubahan rezim dapat dihasilkan karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu karena peralihan dukungan aktor-aktor dalam negeri yang awalnya mendukung pemerintah berpindah kepada koalisi oposisi sehingga kelompok penentang menjadi semakin kuat. Hal-hal yang mempengaruhi keberpihakan aktor terhadap pemerintah yaitu hilangnya tokoh utama dalam rezim, kebijakan penerus yang tidak sesuai dengan keinginan pendukungnya sehingga membuat koalisi rezim akhirnya pecah. Kondisi ini terjadi di Venezuela, beberapa orang yang awalnya mendukung pemerintah mulai beralih haluan menjadi penentang setelah Hugo Chavez meninggal, yang disebabkan karena kondisi krisis dan kebijakan pemerintah yang dianggap semakin otoriter sehingga tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam rezim otoriter sendiri, aktor paling berpengaruh didalam negeri yaitu keberpihakan militer yang sering menjadi kendala untuk transisi. Militer yang ada di Venezuela menunjukkan kondisi tersebut karena hingga saat ini mereka masih mengakui pemerintahan Nicholas Maduro sebagai pemerintah yang sah.

Faktor eksternalnya yaitu kondisi lingkungan regional dari negara tersebut. Lingkungan regional yang mendukung demokrasi akan meningkatkan tingkat kelangsungan rezim kompetitif dan meningkatkan transisi dari kediktatoran menuju rezim kompetitif. Aktor internasional dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu rezim dengan beberapa cara yaitu memberikan bantuan

dana untuk kelompok oposisi, memberikan sanksi sehingga negara akan tertekan, atau bahkan melakukan intervensi militer (Scott dan Liñan, 2014). Hal ini digunakan oleh penulis untuk menjelaskan semakin banyaknya negara yang mengkritik bahkan memberikan sanksi terhadap pemerintahan Venezuela saat ini.

1.6. Argumen Utama

Berdasarkan data sementara yang didapatkan, penulis mengemukakan argumen utama sebagai berikut:

Rezim sosialis Venezuela sedang dihadapkan pada permasalahan serius yaitu krisis ekonomi yang membuat legitimasi terhadap rezim ini menurun drastis. Rezim yang terlalu bergantung terhadap sumber penghasilan yang tidak mampu mereka kontrol harganya, membuat mereka kehilangan sumber pendanaan untuk memenuhi janji-janji program kesejahteraannya. Protes akhirnya muncul dari berbagai pihak, sehingga pemerintah terjebak dalam posisi dilematis antara memperbaiki kondisi perekonomian atau mempertahankan kekuasaan. Pemerintah yang terlihat lebih fokus untuk mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan militer untuk menghentikan protes yang bermunculan, akhirnya membawa kecaman dari dunia internasional terutama di wilayah regional Venezuela yang membuat negara tersebut terisolasi.

Kondisi perekonomian yang semakin memburuk karena pemerintah yang lebih berfokus kepada tolak ukur kesetiaan daripada keahlian untuk memilih orang-orang yang akan menempati posisi penting di pemerintahan, membuat Venezuela kehilangan kekuatan dari diplomasi minyaknya. Negara-negara mitra utamanyapun akhirnya terlihat seolah ragu-ragu untuk memberikan bantuan terhadap Venezuela. Jika kondisi ini terus berlanjut, kemungkinan besar rezim sosialis ini akan mengalami keruntuhan.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara yang memiliki langkah-langkah sistematis untuk mengetahui sesuatu (Husaini dan Akbar, 2009). Metode penelitian diperlukan dalam penulisan sebuah karya ilmiah untuk

memperoleh informasi serta membantu menganalisa dan menjawab pokok permasalahan. Metode penelitian terdiri dari dua bagian, yaitu teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1.7.1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah diperoleh melalui metode-metode tertentu. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data. Sementara itu, sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu melalui pihak lain atau media perantara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang penulis dapat dari berbagai sumber, yaitu:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Jember,
- b) Ruang Baca FISIP Universitas Jember,
- c) Buku, jurnal ilmiah, dan artikel,
- d) Media cetak atau surat kabar, dan
- e) Media internet.

1.7.2. Teknik Analisis Data

Prosedur penulis dalam memperoleh data-data dijelaskan dalam metode analisis data (Pertiwi, 2009). Penulis menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada untuk menjawab permasalahan secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis menyajikan data, menganalisis, kemudian menginterpretasikannya hingga mendapatkan kesimpulan. Oleh karena itu, jawaban dari permasalahan yang disajikan akan lebih bersifat observasi terhadap prospek demokratisasi di Venezuela.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, penulis akan membaginya menjadi lima bab, di mana dalam setiap bab akan terdiri dari sub bab yang saling berkaitan. Sistematika penulisan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, argumen utama, metode penelitian, kemudian sistematika penulisan.

BAB II Sejarah Dan Demokrasi Semu Rezim Sosialis Venezuela

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang awal mula munculnya rezim sosialis di Venezuela, program-program dari rezim sosialis, kemudian juga pemilu 2013, serta demokrasi semu yang ada di Venezuela.

BAB III Krisis Ekonomi di Venezuela

Pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang kondisi perekonomian dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi serta dampaknya di Venezuela.

BAB IV Analisis Prospek Terbentuknya Pemerintahan Demokratis Di Venezuela

Bab ini merupakan bab inti dari penelitian. Penulis akan membahas perkembangan dukungan untuk proses demokratisasi serta hubungan Venezuela dengan mitra-mitra utamanya, untuk mengukur seberapa besar kemungkinan terjadinya perubahan rezim.

BAB V Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis akan mengumpulkan poin-poin utama dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang disusun menjadi sebuah kesimpulan.

BAB 2 SEJARAH REZIM SOSIALIS VENEZUELA

2.1 Perjalanan Hugo Chavez menjadi Presiden Venezuela

Kerusuhan Caracazo (El Caracazo) menjadi cikal bakal munculnya gerakan revolusi bolivarian yang kemudian nanti akan memunculkan rezim sosialis di Venezuela. Kerusuhan tersebut muncul akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh Presiden Carlos Andres Perez yang memutuskan untuk bekerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) (Karl, 1993). Kerjasama tersebut diambil dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian yang tidak stabil karena korupsi dan birokratisasi namun hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Privatisasi terhadap semua sektor perekonomian sebagai hasil dari kerjasama Presiden Carlos Andres Perez dan IMF memberikan dampak negatif terhadap perekonomian di Venezuela. Terjadi kenaikan harga yang tidak terkendali pada berbagai macam barang, perusahaan-perusahaan asing membawa 100% keuntungan yang didapat ke negara asalnya, penerapan sistem kerja kontrak, inflasi mencapai 80,7%, pengangguran meningkat hingga 14%, yang menyebabkan lebih dari 80% rakyat Venezuela hidup dalam kemiskinan (Raby, 2006). Presiden Carlos Andres Perez juga menaikkan tarif bus 30% dan harga BBM sebesar 100% yang kemudian memantik terjadinya kerusuhan besar di Venezuela (Raby, 2006).

Polisi dan tentara kemudian diperintahkan oleh Presiden Carlos Andres Perez untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi. Mereka diinstruksikan untuk menggunakan peluru tajam dalam upaya menghentikan masyarakat yang rusuh. Setidaknya 3000 orang menjadi korban dalam peristiwa kerusuhan tersebut. Banyaknya korban yang jatuh memunculkan perpecahan di dalam kelompok angkatan bersenjata. Tentara kemudian terbelah dua karena ada beberapa perwira yang meragukan pemerintah dan mempertanyakan perintah untuk menembaki rakyat jelata. Pergerakan Revolusioner Bolivarian 200³ atau MBR-200 kemudian dibentuk oleh sekelompok perwira junior yang berpangkat kapten dengan tujuan

³Angka 200 menjadi angka yang mereka ambil berdasarkan peringatan dua ratus tahun kelahiran Simon Bolivar

untuk membebaskan Venezuela dari belenggu penindasan. Felipe Acosta Carlos, Jesus Urdaneta Hernandez, Rafael Baduel dan Hugo Chavez Frias merupakan kelompok yang mendirikan pergerakan tersebut.

Membentuk kelompok diskusi, serta pengorganisasian tentara-tentara generasi baru yang berasal dari kaum tani dan kelas pekerja miskin merupakan langkah awal yang dilakukan oleh MBR-200. Peralihan pendidikan dari Fort Benning AS menuju Akademi Militer Nasional Ciracas semenjak transformasi tahun 1971 membuat tentara memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masyarakat golongan menengah kebawah (Lopez, 2008). Seiring berjalannya waktu kelompok militer dengan gerakan MBR-200nya kemudian berinisiatif untuk meningkatkan perjuangan mereka dengan mencoba melakukan kudeta terhadap pemerintahan presiden Carlos Andres Perez. Tanggal 4 Februari 1992 Hugo Chavez dan kawan-kawan merealisasikan upaya kudeta yang mereka rencanakan dengan membawa sekitar 5000 pasukan namun rencana tersebut gagal (Lopez, 2008). Kurangnya dukungan dari masyarakat pekerja yang merupakan kekuatan utama dari gerakan revolusi menjadi salah satu faktor ketidakberhasilan upaya tersebut. Masyarakat kelas pekerja lebih banyak tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dan belum mengerti terhadap gerakan yang dilakukan oleh MBR-200. Akhirnya Hugo Chavez dan kawan-kawannya menyerah dengan syarat mendapat kesempatan berpidato di depan televisi nasional. Hugo Chavez menyatakan diri sebagai yang bertanggung jawab dalam upaya kudeta yang terjadi, kemudian dia dijatuhkan hukuman selama 30 tahun karena dianggap menentang pemerintah (Lopez, 2008).

Selama dipenjara Hugo Chavez tetap menjalin hubungan dengan kelompok pergerakan revolusi. Gerakan rakyat melawan neoliberalisme semakin menguat ketika Hugo Chavez berada di dalam penjara. Menjelang pemilu 1993 di Venezuela, kudeta yang dilakukan oleh Chavez dan kawan-kawan menjadi salah satu isu populis yang digunakan oleh para politikus untuk mencari dukungan rakyat. Rafael Caldera menjadi pemenang dalam pemilu 1993 dengan mengangkat isu tersebut. Dia mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat dan beberapa partai politik (partai-partai kiri, sosial demokrat dan kelompok sayap kanan tengah). Setelah memenangkan pemilu Rafael Caldera membebaskan orang-orang

yang terkait dengan upaya kudeta terhadap pemerintahan sebelumnya dari dalam penjara pada tahun 1994. Hugo Chavez hanya menjalani hukuman selama dua tahun dan hak-hak politiknya kembali utuh karena dinyatakan bersih (Pram, 2008).

Hugo Chavez menjadi simbol oposisi politik Venezuela setelah keluar dari penjara. Dia meminta parlemen nasional untuk melakukan perubahan pada hukum, standar hidup, dan memberantas korupsi di pemerintahan. Bobroknya pemerintahan di periode sebelumnya menjadi beban yang harus diterima oleh Rafael Caldera menjadi kendala utama dalam masa pemerintahannya sehingga permintaan Hugo Chavez tidak bisa direalisasikan. Krisis pada tahun 1994 semakin membuat Kondisi perekonomian Venezuela tidak stabil. Bank Sentral Venezuela di paksa untuk menyelamatkan setidaknya 14 bank yang bangkrut (Soyomukti, 2007). Harga minyak dunia yang terjun bebas kala itu juga menjadi masalah karena mengurangi pendapatan negara. Lemahnya posisi tawar Venezuela membuat Rafael Caldera kembali melanjutkan kebijakan-kebijakan seperti yang diarahkan oleh IMF. Permasalahan di Venezuelapun terus berlanjut yang menyebabkan ketidakpuasan pada masyarakat.

Hugo Chavez bersama MBR-200 kemudian berkeliling ke pelosok-pelosok di Venezuela untuk mendekati rakyat dengan membentuk komite-komite Bolivarian dan menyerukan pembentukan Majelis Konstituante (Soyomukti, 2007). Program-program yang tersusun secara sistematis digunakan oleh Hugo Chavez bersama gerakannya untuk mengetahui keinginan rakyat, serta membantu rakyat dengan kerja-kerja nyata yang mereka lakukan. Seiring berjalannya waktu nama Hugo Chavez semakin dikenal oleh masyarakat dan dukunganpun semakin menguat kepadanya. Keinginan untuk terjun ke politik akhirnya muncul untuk membantu tujuan perubahan yang diinginkan oleh Chavez. Belajar dari pengalaman masa lalu dari gagalnya kudeta yang mereka lakukan akhirnya dilakukan semacam survey untuk mengetahui kekuatan dukungan yang dimiliki. Tingginya dukungan dari rakyat membuat Hugo Chavez memutuskan untuk mengikuti pemilu pada tahun 1998.

MVR (*Movimiento Quinta Republica*) atau “Pergerakan Republik Kelima”⁴ menjadi partai politik yang didirikan oleh Hugo Chavez dan kawan-kawannya pada bulan Juli 1998 untuk terjun dalam pemilu. Partai MVR merupakan koalisi dari aktivis serikat dagang, pelajar, pecinta lingkungan, mantan pejabat militer, dan partai-partai kecil aliran kiri. Mengamankan umat manusia dalam komunitas nasional, memuaskn apirasi individu dan kolektif rakyat Venezuela, dan menjamin kondisi kemakmuran yang optimal bagi bangsa menjadi misi yang dikemukakan dalam deklarasi partai MVR (*Movimiento Quinta Republica*). Partai ini menjadi saingan utama dari dua partai besar yang telah lama menguasai perpolitikan di Venezuela yaitu AD (*Accion Democratica*) dan COPEI (*Christian Democratic Party*). Kedua partai tersebut merupakan pendiri dari negara *punto fijo* yang berkuasa selama puluhan tahun di Venezuela (Soyomukti, 2007).

Pemilu tahun 1998 yang dilaksanakan pada bulan Desember menjadi pertarungan pertama partai yang didirikan oleh Hugo Chavez dan kawan-kawannya dalam kancah politik di Venezuela. Terdapat 3 (tiga) calon presiden pada pemilu tahun 1998 tersebut. Hugo Chavez menjadi calon presiden yang diusung oleh partai MVR sedangkan dua partai yang merupakan pesaing utama dalam pemilu (partai AD dan COPEI) sepakat untuk mengusung satu nama yaitu Henrique Salas Romer. Satu calon presiden lainnya berasal dari jalur independen yaitu Irene Saez. Kampanye yang masif dilakukan oleh Hugo Chavez untuk memenangkan pemilu tersebut. Tiga poin utama yang dikemukakan dalam kampanyenya yaitu :

1. Pengakhiran rezim *punto fijo*. Hugo Chavez berjanji mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh dua partai utama di Venezuela yaitu *Christian Democratic Party (COPEI) and the Social Democratic Action Party (AD)* yang membentuk sebuah rezim *punto fijo* di Venezuela dan menggantinya dengan sistem yang lebih demokratis.

⁴Dinamakan MVR (*Movimiento Quinta Republica*) atau “Pergerakan Republik Kelima” karena dalam sejarah Venezuela telah memiliki empat republik. Dua terbentuk pada tahun 1811 dan 1813 selama perang kemerdekaan, ketiga yang mencakup “Gran Kolombia” di tahun 1819, dan yang keempat didirikan tahun 1830.

2. Mengakhiri perpolitikan yang korup. Membersihkan pemerintahan dari korupsi menjadi janji lain yang dikemukakan oleh Hugo Chavez dalam kampanyenya.
3. Hugo Chavez juga berjanji untuk mengakhiri kemiskinan yang terjadi di Venezuela dengan memasukkan agenda sosial untuk kesejahteraan rakyat Venezuela (Judith, 2007).

Nama besar yang telah dibangun beberapa waktu sebelum pemilu dan kampanye yang menjanjikan perbaikan ekonomi membawa Hugo Chavez menjadi presiden setelah menang dalam pemilu 1998 (Ossietzky, 2008). Dia mengungguli dua calon lainnya dengan mendapatkan 56,2% suara sedangkan Henrique Salas Romer yang mendapatkan 39,97% suara dan Irene Saez hanya mendapatkan 1% suara (Tarver, 2005). Tanggal 4 Februari 1999 Hugo Chavez resmi dilantik sebagai presiden. Kemenangan tersebut mengakhiri dominasi dua partai besar di Venezuela yang biasanya memenangkan pemilu dengan angka 90% selama puluhan tahun (Tarver, 2005). Rezim memang beralih kepada Hugo Chavez namun sistem belum berubah hingga di sahkannya konstitusi 1999 yang merupakan konstitusi baru di Venezuela.

2.2 Realisasi semangat revolusi bolivarian Hugo Chavez

2.2.1 Pembentukan Konstitusi 1999

Setelah memenangkan pemilu pada tahun 1998, Revolusi yang pertama sekali dilakukan oleh Chavez adalah perubahan konstitusi yang berpihak kepada rakyat. Chavez sangat memahami bahwa konstitusi sangat dibutuhkan untuk sebuah revolusi sebagai upaya mengatur dasar-dasar pengelolaan negara dan bagaimana kekuatan aktif dari bawah harus ikut berperan menjaga semangat revolusi. Konstitusi baru, merupakan jembatan dari tatanan kekuasaan lama menuju revolusi Bolivarian. Penyusunan konstitusi baru dilakukan dengan upaya untuk melindungi hak-hak rakyat miskin hingga menghasilkan konstitusi 1999. Hugo Chavez mengajukan rancangan konstitusi tersebut kepada Majelis Nasional. Untuk memperkuat diri sebagai sosok yang demokratis Hugo Chavez memulai referendum untuk memberlakukan konstitusi yang telah disusun. Dalam

referendum 1999 Hugo Chavez mendapat dukungan mayoritas yang mencapai 59% membuat konstitusi tersebut resmi diberlakukan. Konstitusi 1999 yang berisi 3 bab dan 350 ayat membuatnya menjadi konstitusi paling panjang, lengkap, dan komprehensif (Soyomukti, 2007).

Konstitusi 1999 berisi tentang berbagai perubahan mulai dari simbolik hingga sistem politik dan ekonomi di Venezuela. Beberapa perubahan pada level simbolik negara tercantum dalam konstitusi 1999. Pertama adalah nama negara Venezuela berubah menjadi Republik Bolivarian Venezuela⁵ yang disetujui oleh Majelis Nasional. Simbol 8 (delapan) bintang ditambahkan pada bendera Venezuela untuk mewakili provinsi timur Guyana dan memenuhi usulan Bolivar tentang bendera dengan 8 (delapan) bintang. Perubahan juga terjadi pada cap kenegaraan Venezuela menjadi fitur kuda putih pada sebelah kiri, busur, anak panah dan pedang ditambahkan untuk mewakili masyarakat adat dan buruh. Perubahan signifikan terlihat pada bentuk republik yang ada pada konstitusi 1999 dengan adanya penambahan cabang kewarganegaraan (Citizen's Power) sebagai cabang pemerintahan. Terdapat 5 (lima) cabang pemerintahan dalam konstitusi 1999 di Venezuela yaitu cabang yudisial (The Judiciary), cabang eksekutif (The Presidency), cabang legislatif (The National Assembly), cabang pemilihan (Electoral Power), dan cabang kewarganegaraan (Citizen's Power).

Reformasi struktur pemerintahan dilakukan Chavez melalui konstitusi 1999 dengan menambah masa jabatan presiden dari 4 tahun menjadi 6 tahun dan membatasi masa jabatannya menjadi 2 kali periode. Majelis Nasional juga menjadi bagian yang mengalami reformasi yang sebelumnya bikameral menjadi unikameral dengan menghilangkan kekuatan lembaga legislative. Perubahan pada susunan lama yang sebelumnya memiliki dua kekuatan (bidang) kekuasaan legislative antara Bidang Deputi (Chamber of Deputies) dan Senat berubah menjadi satu kamar (single chamber). Kekuasaan cabang-cabang legislative juga

⁵Nama ini dipakai sejak penggunaan konstitusi 1999 untuk mengenang jasa pahlawan Simón Bolívar. Hugo Chavez mengidolakan Simon Bolivar dan selalu mendengungkan nama Bolivar disetiap pidatonya yaitu "Viva Bolivar". Simon Bolivar yang menjadi tokoh besar dalam perjuangan untuk pembebasan dari penjajahan Spanyol di Amerika Latin juga dikenal dengan julukan "El Libertador".

dikurangi dan diberikan kepada presiden. Hal tersebut memperlihatkan berjalannya proses Bolivarian Chavez di Venezuela. Konstitusi 1999 menjadi sebuah pegangan rakyat dan pemerintah dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Venezuela.

2.2.2 Kebijakan ekonomi

Masalah ekonomi menjadi faktor penting dalam sebuah revolusi, karena hal tersebut yang akan menjadi sumber pembiayaan bagi sebuah perubahan. Hugo Chavez dan para pendukungnya juga melakukan perubahan terhadap perekonomian yang ada di Venezuela. Janji-janji yang dikeluarkan oleh Hugo Chavez untuk menyejahterakan rakyat yang sedang terpuruk harus segera terealisasi agar dia dapat mempertahankan dukungan dari masyarakat. Reformasi ekonomipun akhirnya dilaksanakan oleh Hugo Chavez beserta pendukungnya.

Program-program perubahan yang dijanjikan oleh Hugo Chavez membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga minyak yang menjadi kekayaan terbesar Venezuela menjadi sumber pendanaan yang paling memungkinkan untuk hal tersebut. Langkah nasionalisasi akhirnya diambil oleh pemerintah untuk mengambil alih keuntungan yang sebelumnya didapatkan oleh pihak swasta. Pemerintah mulai menasionalisasi PDVSA dan perusahaan-perusahaan asing seperti Chevron Corps, Royal Dutch Shell, Repsol, dan Exxon Mobile untuk menambah pemasukan devisa melalui produksi minyak. PDVSA merupakan perusahaan yang paling besar dan paling banyak mempekerjakan buruh dan dikuasai oleh konglomerat swasta yang mengambil keuntungan sangat besar. Nasionalisasi PDVSA dilakukan dengan mengganti direktur PDVSA lama dengan direktur baru yang lebih berpengalaman dan berpihak terhadap pemerintah. Pergantian ini dilakukan pada 25 Februari 2002 (Bruce, 2008).

Harga minyak yang tinggi pada masa pemerintahan Hugo Chavez memberikan keuntungan yang sangat luar biasa besar. Setiap harinya pendapatan devisa dari ekspor minyak berkisar antara 3 miliar sampai 4 miliar US dollar (Soyomukti, 2007). Peningkatan harga minyak dunia yang sangat tinggi hingga mencapai 100 US dollar membuat pemerintah mengalihkan investasi kepada

sektor minyak. Keuntungan tersebut digunakan oleh pemerintah untuk merealisasikan program-program sosial dan mengimpor sebagian besar produk-produk konsumsi. Impor produk-produk konsumsi dilakukan karena selain relatif mudah, juga karena biaya produksi didalam negeri lebih mahal. Resiko yang harus diambil ketika mengalihkan investasi kepada satu sektor dominan.

2.2.3 Kebijakan sosial

Janji utama dalam kampanye Hugo Chavez adalah menyejahterakan masyarakat yang mengalami permasalahan sosial pada pemerintahan sebelumnya. Tingkat kemiskinan tinggi, kelaparan, rendahnya kualitas pendidikan, tingginya angka putus sekolah, dan lain sebagainya menjadi hal urgent yang harus segera ditangani. Keuntungan besar yang didapatkan dari produksi minyak mulai digunakan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Pemerintah melakukan langkah-langkah kebijakan sosial yang disebut *Misiones* (misi) untuk memperbaiki kondisi sosial rakyat Venezuela yang dimulai pada awal tahun 2003. *Misiones* ini merupakan perwujudan dari program kebijakan Hugo Chavez yang disebut dengan Plan Bolivar 2000. Dana yang sangat besar dihabiskan untuk realisasi Plan Bolivar 2000 ini. Ratusan juta dollar harus dikeluarkan pemerintah untuk membiayai proyek seperti mendirikan sekolah untuk rakyat miskin, membangun infrastruktur jalan, kesehatan untuk rakyat miskin, dan distribusi bahan makanan pokok di pasar-pasar tradisional (Soyomukti, 2007). Hugo Chavez melibatkan militer dalam pelaksanaan program ini untuk membentuk aliansi sipil dan militer (Hawkins, 2010).

Tujuan dari *Misiones* yang dikeluarkan pemerintah tidak hanya untuk mengurangi kemiskinan yang di derita rakyat Venezuela, tetapi juga menggantikan sistem ekonomi negara dari yang menganut sistem pasar menjadi sistem yang kooperatif, bersifat lokal, dan dikontrol oleh negara. Pemerintah menyebut hal tersebut dengan istilah "*endogenous development*." Pemerintah berusaha dengan ini tidak melengkap sektor swasta yang sudah ada tetapi berusaha menyainginya karena *Misiones* ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan dijalankan dengan regulasi baru dengan campur tangan

pemerintah yang dominan. Kondisi keuangan negara yang masih kaya dari penghasilan minyak membuat *Misiones-Misiones* tersebut berjalan dengan lancar.

a. *Misiones* di bidang pendidikan

Pemerintahan Chavez mengeluarkan beberapa program dalam bidang pendidikan. Dia berusaha untuk menjamin hak-hak rakyatnya untuk pendidikan seperti yang diamanatkan dalam Konstitusi Bolivarian bahwa pemerintah harus menjamin kesehatan dan pendidikan gratis bagi seluruh rakyatnya. *Misiones Robinson* menjadi program pertama pemerintah dalam bidang pendidikan yang dicanangkan pada 30 Mei 2003 dan kemudian direalisasikan secara formal pada 1 Juli 2003 oleh Kementerian Pendidikan Venezuela (Hawkins, 2010). Tujuan dari *Misiones* ini adalah untuk memberantas buta huruf yang diawali dengan memberikan pelatihan kilat kepada guru-guru dan mencetak guru tambahan agar mereka mempunyai keterampilan untuk mengajar murid-murid membaca dan mengajar di tingkat dasar. Program ini kemudian dilanjutkan dengan *Misiones Robinson II* yang dilaksanakan mulai 28 Oktober 2003. Rakyat yang putus sekolah maupun yang masih bersekolah di tingkat pendidikan dasar menjadi sasaran dari misi lanjutan ini (Hawkins, 2010). Pemerintah membangun sebanyak 3000 sekolah Bolivarian yang berhasil meluluskan 900 ribu orang yang putus sekolah di tingkat dasar pada tahun 2004 dan di klaim telah berhasil membebaskan Venezuela dari buta huruf pada tahun 2005 (Soyomukti, 2007).

Program selanjutnya di bidang pendidikan adalah *Misiones Sucre* dan *Misiones Ribas*. *Misiones Sucre* dilaksanakan mulai 10 Juli 2003 yang ditujukan kepada rakyat yang tidak mampu mengakses pendidikan di Universitas sedangkan *Misiones Ribas* merupakan program yang bertujuan untuk menyekolahkan orang-orang yang putus sekolah di tingkat SLTA dan dilaksanakan mulai 17 November 2003. Kedua program ini mendidik rakyat yang putus sekolah untuk belajar selama dua tahun yang nantinya memberikan mereka kesempatan untuk dapat bekerja di PDVSA atau CADAFE. Pemerintah membangun sekitar 200 Universitas Simon Bolivar di kota-kota Venezuela dan juga memberikan bantuan dana senilai 100 US dollar perbulan kepada mahasiswa demi mendukung program

tersebut (Tarver dan Frederick, 2005). Pemerintah juga meluncurkan *Misiones Science* pada bulan Maret 2006 untuk menciptakan jaringan-jaringan penelitian baru di universitas-universitas Venezuela yang menghabiskan dana lebih dari 400 juta US dollar (Hawkins, 2010).

b. *Misiones* dibidang kesehatan

Pemerintahan Hugo Chavez menganggap kesehatan rakyat sebagai hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam konstitusi Venezuela hal tersebut juga dicantumkan yaitu pada pasal 83-85. Pada pasal 83 Konstitusi Bolivarian dituliskan bahwa:

Kesehatan merupakan hak sosial yang fundamental dan merupakan tanggungjawab negara yang akan menjaminkannya sebagai hak hidup. Negara harus meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan umum, dan akses pelayanan. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan, sebagaimana tugas untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya pemajuan dan perlindungan yang sama, serta tunduk pada ukuran-ukuran kesehatan seperti yang ditetapkan undang-undang, dan dalam kesesuaiannya dengan konvensi dan persetujuan Internasional yang disusun dan diratifikasi oleh republik.

Pasal tersebut menegaskan bahwa kesehatan seluruh rakyat Venezuela merupakan tanggungjawab negara (pemerintah berkuasa) baik dari golongan yang sangat miskin hingga golongan menengah keatas tanpa terkecuali. Sedangkan pada pasal 84 dijelaskan bahwa aset-aset pelayanan kesehatan menjadi milik negara dan tidak boleh diprivatisasi.

Agar dapat menjamin hak-hak kesehatan, negara menciptakan, melakukan panduan, dan mengurus sistem kesehatan publik nasional yang lintas sektor dan batas-batas, dan didesentralisasikan serta berwatak partisipatif, terintegrasi dengan sistem keamanan sosial, keadilan, integrasi sosial, dan solidaritas. Sistem kesehatan publik memberikan prioritas untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit, menjamin pelayanan yang tetap dan cepat dan rehabilitasi kualitas. Aset-aset dan pelayanan kesehatan publik adalah milik negara dan tidak boleh diprivatisasi. Komunitas yang terorganisir memiliki hak-hak dan tugas untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan rencana, implementasi, dan kontrol kebijakan dalam institusi-institusi kesehatan (Konstitusi Bolivarian, 1999).

Pelayanan kesehatan di Venezuela juga diberikan gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun karena sudah menjadi tanggung jawab negara. Pemerintah

dituntut mampu mengalokasikan pendapatan dari sektor pendapatan dominan untuk menyediakan pelayanan kesehatan gratis tersebut. Hal tersebut dicantumkan pada Konstitusi Bolivarian pasal 85 yang bertuliskan:

Pembiayaan sistem kesehatan publik adalah tanggungjawab negara yang harus mengintegrasikan sumber-sumber pendapatan, kontribusi keamanan sosial sesuai yang dimaksudkan dan berbagai sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksudkan undang-undang. Negara menjamin anggaran kesehatan seperti membuat capaian-capaian tujuan kebijakan kesehatan dimungkinkan. Dengan berkoordinasi dengan universitas dan lembaga penelitian, kebijakan pelatihan teknis, dan profesional negara dan industri nasional menghasilkan pasokan perawatan kesehatan akan dikembangkan dan ditingkatkan. Negara akan mengatur baik lembaga-lembaga kesehatan yang publik dan yang privat (Konstitusi Bolivarian, 1999).

Pemerintahan Hugo Chavez berusaha mewujudkan amanat konstitusi yang sangat besar tersebut dengan melaksanakan beberapa program *Misiones*. Program pertama yaitu *Misiones Barrio Adentro* yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas kesehatan gratis. Misi ini dibantu oleh tenaga dokter dari Kuba yang berjumlah sekitar 8.000-13.000 orang untuk melayani kesehatan rakyat Venezuela secara gratis. Kuba mengirimkan dokter-dokter tersebut sebagai bagian dari kerjasama untuk mendapatkan minyak murah dari Venezuela (Levin, 2007). Penggunaan dokter dari Kuba juga dikarenakan dokter-dokter yang pro dengan rezim lama tidak mau bekerja untuk program ini karena dibayar murah dengan tanggung jawab yang besar yaitu harus bertanggung jawab terhadap kesehatan 200 keluarga miskin (Soyomukti, 2007). Pemerintahan Hugo Chavez mengklaim bahwa dalam setahun, *Misiones* ini telah menyelamatkan 5000 jiwa dan merawat lebih dari 18 juta penduduk atau sekitar 70% dari jumlah populasi Venezuela (Soyomukti, 2007).

Program selanjutnya yang dikeluarkan pemerintah adalah *Misiones Mercal* (kependekan dari *Mercados de Alimentos*). Tujuan dari *Misiones Mercal* adalah untuk menyediakan bahan makanan maupun makanan murah untuk rakyat. Pemerintah membuka pasar makanan rakyat dengan membeli makanan dari perusahaan makanan kemudian memberikan subsidi dan menjualnya ke pasar makanan tradisional sehingga harganya 30% lebih murah daripada harga makanan di supermarket besar (Soyomukti, 2007). Pada tahun 2006, lebih dari 209

pertokoan milik pemerintah, 870 toko yang bekerja sama dengan pemerintah lokal, dan lebih dari 12.000 pasar tradisional menjual produk makanan murah yang disediakan pemerintah. Berdasarkan hasil survey dari *American Barometer*, 71% rakyat Venezuela merasakan manfaat dari *Misiones Mercal* dan juga hampir 50% rakyat Venezuela merasakan manfaat dari *Misiones Barrio Adentro* (Hawkins, 2010). Pemerintah juga meluncurkan *Misiones Negra Hipolita* Pada 14 Januari 2006 yang merupakan misi perawatan kesehatan primer dan dikhususkan untuk penduduk yang sangat miskin. gelandangan, tunawisma, pecandu obat-obatan terlarang, dan bagi mereka yang berada pada titik kemiskinan yang kritis juga mendapatkan bantuan kesehatan (Soyomukti, 2007). Pemerintah juga membangun rumah untuk rakyat miskin dan juga akses air bersih yang segar dan sehat.

c. *Misiones* dalam persamaan hak warga negara

Persamaan hak warga negara juga menjadi perhatian dari pemerintahan Hugo Chavez khususnya menyangkut warga asli atau pribumi. Perlakuan deskriminatif yang dilakukan oleh penjajah spanyol ataupun penguasa sebelumnya berusaha untuk dirubah oleh pemerintah. Beberapa program dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung upaya tersebut. *Misiones Guacaipuro* yang merupakan program pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mulai dilaksanakan 12 Oktober 2003. Program ini dibuat untuk melindungi hak-hak penduduk pribumi Venezuela, menjamin hak-hak kultural yang harus dihormati dan juga melindungi tanah-tanah komunitas adat (Soyomukti, 2007). Dengan program ini penduduk pribumi memiliki peluang yang lebih besar dalam mengelola tanah dan komuditas yang ada.

Misiones Identidad menjadi program lanjutan dari *Misiones Guacaipuro* yang mulai dilaksanakan pada 4 Februari 2004. Program ini merupakan tahap pendataan bagi penduduk pribumi. Dalam program ini dilakukan pembuatan tanda identitas gratis bagi mereka yang sudah tinggal di Venezuela selama 20-30 tahun, tetapi tidak pernah memperoleh perlindungan sebagai warga negara. Pemerintah juga berusaha membangun pemahaman baru mengenai sejarah sebenarnya masyarakat adat pribumi dan perlawanan masyarakat adat salah satunya dengan

mengganti nama *Colombus Day* menjadi *Invasion Day* (Hari Invasi) (Soyomukti, 2007). Pemerintah berusaha membangun pemahaman bahwa masyarakat pribumi harus berusaha berjuang melindungi kekayaan yang mereka miliki dari asing. Program tersebut dilanjutkan dengan membentuk *Misiones Cultura* pada 14 juli 2005 yang bertujuan membantu adanya inisiatif budaya yang muncul dari komunitas-komunitas lokal. Pemerintah melatih sekitar 30.000 orang untuk mengorganisir misi-misi di berbagai daerah untuk menciptakan berbagai macam kegiatan kebudayaan (Soyomukti, 2007).

Pemerintah juga berusaha membangun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan seperti yang diamanatkan pada Konstitusi Bolivarian pasal 88.

Negara menjamin kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan hak untuk bekerja. Negara mengakui pekerjaan rumah tangga sebagai kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah dan menghasilkan kekayaan dan kesejahteraan sosial. Ibu rumah tangga berhak atas jaminan sosial sesuai dengan hukum (Konstitusi Bolivarian, 1999).

Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan mulai dikeluarkan oleh pemerintah seperti memberlakukan upah minimum bagi tenaga kerja perempuan, waktu kerja 8 jam per hari, tidak ada paksaan dalam kerja lebih, dan kesejahteraan bagi buruh wanita lainnya. Kaum perempuan yang pada mulanya mendapat gaji paling rendah mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar dan tunjangan dari pemerintah. Bank perempuan juga didirikan oleh pemerintah pada tahun 2001 yaitu BANMUJER (Kozloff, 2008). Bank ini menjadi satu-satunya bank perempuan milik pemerintah yang ada di dunia. Pemerintah berusaha untuk mengurangi kemiskinan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua rakyat. Bank ini memberikan kredit murah kepada komunitas kaum perempuan yang beranggotakan 5 sampai 10 orang yang akan memulai usaha dengan bunga tahunan 12% dan apabila produksinya berhubungan dengan kegiatan pertanian, bunga yang diberikan lebih rendah yaitu 6% (Soyomukti, 2007).

Pemerintah juga mendirikan sebuah lembaga nasional yang bernama INAMUJER untuk mewadahi problematika perempuan di Venezuela baik itu

masalah politik maupun sosial. Lembaga tersebut diketuai oleh Maria Leon yang merupakan mantan pejuang gerilya pendukung pemerintah. Peran lembaga ini adalah untuk mendidik kaum perempuan agar dapat memperjuangkan hak-hak politik, sosial, dan kultural mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini adalah melakukan kampanye hak-hak reproduksi dan seksual perempuan, juga pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga kemudian menyelenggarakan program pelatihan kepada polisi, pengacara, dan dokter agar mereka peka terhadap permasalahan perempuan. Layanan Call Center 24 jam juga dibuka untuk korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga disediakan tempat penampungan bagi mereka yang jiwanya merasa terancam (Kozloff, 2008).

Komitmen terhadap perjuangan kesetaraan perempuan juga ditunjukkan oleh partai MVR dengan memberikan kuota perempuan untuk Majelis Nasional, hingga sampai level daerah. Pemerintah juga meluncurkan program *Misiones Madres del Barrio* yang bertujuan untuk memberikan bantuan finansial terhadap ibu-ibu miskin agar berperan dalam mengatur ekonomi, mengasuh, dan membesarkan anak-anaknya. Perempuan yang hanya berperan sebagai ibu rumah tangga juga mendapat tunjangan dari pemerintah (Kozloff, 2008).

2.2.4 Kebijakan dalam hubungan internasional

Keputusan yang sangat berani diambil oleh Hugo Chavez dalam kebijakan internasionalnya yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Dia mengedepankan prinsip anti neoliberalisme dan anti kapitalisme dalam kebijakannya. Dia menjalin hubungan dengan pemimpin negara-negara yang menjadi musuh AS seperti Fidel Castro (Kuba), Muammar Qaddafi (Presiden Libya), Saddam Hussein (Presiden Irak), dan Mahmud Ahmadinejad (Presiden Iran). Kuba menjadi mitra utama yang sangat dekat dengan Venezuela (Clairmont, 2007). Secara umum tujuan kebijakan luar negeri Hugo Chavez adalah melawan imperialisme, neoliberalisme, dan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh AS kepada negara-negara dunia ketiga dan negara-negara Amerika Latin dan mengembalikan kedaulatan sumber daya alam yang dimiliki Venezuela (Wilpert, 2007). Dia mempercayai bahwa dengan kekuatan minyak yang dimiliki

Venezuela dan kebijakan yang diterapkannya dapat membantu negara-negara Amerika Latin menemukan jalan menuju demokrasi sosialis.

Hugo Chavez mulai merubah haluan kebijakan ekonomi internasional pada pemerintahan sebelumnya yang bekerjasama dengan AS dan sekutunya menjadi sebaliknya. Dia mengunjungi negara-negara anggota OPEC yang ada di Timur Tengah untuk berusaha mengendalikan harga minyak. Kunjungan Hugo Chavez tersebut mendapat sambutan baik dari anggota-anggota OPEC yang kemudian mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi OPEC di Caracas yang dilaksanakan pada 27-28 September 2000 (Ossietzky, 2008).

Hal tersebut sangat bertentangan dengan kepentingan AS yang menginginkan harga minyak rendah. Chavez juga menginginkan perluasan hubungan kerjasama dengan negara-negara seperti India, China, dan Rusia. China menjadi negara yang sangat tertarik dengan tawaran minyak yang ada di Venezuela hingga akhirnya mereka sepakat untuk memperbesar intensitas perdagangan antar kedua negara (Soyomukti, 2007).

Dia juga terus berkomitmen untuk berperan aktif dalam ALBA yang dirintisnya bersama Fidel Castro. Hugo Chavez berusaha untuk mengintegrasikan kekuatan di Amerika Latin melalui ALBA. Dia menginginkan negara-negara di Amerika Latin dan Karibia menjadikan ALBA sebagai wadah kerjasama dalam rangka melawan kapitalisme. Bantuan perekonomian dari Venezuela dengan memberikan minyak murah dan program-program sosial melalui ALBA sempat berhasil menjauhkan mereka dari jeratan kapitalisme yang diwakili oleh AS melalui IMF dan Bank Dunia. Popularitas Hugo Chavez di dunia internasional meningkat dengan kebijakan-kebijakan revolusionernya. Beberapa menaruh sikap hormat namun tidak sedikit yang membencinya terutama AS sebagai negara yang berusaha di hindari oleh Venezuela (Agus, 2011).

2.3 Upaya menentang pemerintahan Hugo Chavez

2.3.1 Kudeta tahun 2002

Kebijakan Hugo Chavez yang dikeluarkan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat kelas bawah tidak serta merta berjalan dengan mudah.

Beberapa golongan tidak setuju dengan apa yang telah dikeluarkan oleh Hugo Chavez. Salah satu kebijakan yang membawa pertentangan yang cukup besar yaitu keputusan untuk menasionalisasi perusahaan asing yang ada di Venezuela (Cahyo, 2011). Perusahaan-perusahaan asing yang masih berada di Venezuela dinasionalisasi oleh pemerintah yang membuat PDVSA sekurang-kurangnya mengendalikan 60% proyek-proyek Orinoco Belt Project (Bruce, 2008). Enam perusahaan besar yang menjadi sasaran kebijakan tersebut adalah Conoco Philips, Chevron dan Exxon Mobil dari Amerika, Statoil dari Norwegia dan Total dari Prancis (Bruce, 2008). Para penentang yang terdiri dari anggota militer dan federasi kamar dagang membangun kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan Hugo Chavez. Kelompok tersebut pada tahun 2002 berusaha meng kudeta Hugo Chavez dengan mengerahkan ratusan ribu demonstran untuk melakukan aksi demonstrasi di perusahaan minyak negara (PDVSA) kemudian menuju istana presiden (Kirk, 2010).

Demonstran dan tentara anti-pemerintah yang bersenjata artileri berat berhasil menculik Hugo Chavez dan dibawa menuju Fort Tiuna (Kirk, 2010). Dengan menggunakan media televisi Jenderal Lucas Rincon kemudian menyatakan bahwa Hugo Chavez telah memundurkan diri meskipun sebenarnya tidak ada pernyataan tersebut dari Hugo Chavez secara langsung (Kirk, 2010). Keberhasilan membawa Hugo Chavez keluar dari istana presiden segera diikuti dengan mengukuhkan Pedro Carmona menjadi presiden Venezuela ad interim (sementara) (Kirk, 2010). Pedro Carmona kemudian mengeluarkan dekrit untuk membubarkan majelis nasional dan mahkamah agung, kemudian membatalkan konstitusi 1999 yang dikeluarkan oleh Hugo Chavez. Carmona juga memecat gubernur-gubernur dan walikota di negara bagian diikuti dengan represi terhadap kaum kiri (Kirk, 2010).

Keberhasilan kudeta yang dilakukan Carmona dan militer anti-Hugo Chavez tidak berlangsung lama. Rakyat miskin Venezuela yang melihat sebuah harapan untuk perbaikan kondisinya dengan kebijakan yang dikeluarkan Hugo Chavez kemudian melakukan demonstrasi. Masyarakat tersebut tidak percaya dengan pernyataan bahwa Hugo-Chavez telah memundurkan diri kemudian mulai

turun kejalan dan dalam waktu singkat mampu memenuhi istana presiden. Mereka menuntut agar Hugo Chavez kembali menjadi presiden. Para tentara pro pemerintah yang awalnya ragu pada dukungan rakyat kepada Hugo Chavez akhirnya mulai yakin setelah menyaksikan keteguhan hati dari perlawanan rakyat. Para tentara kemudian dengan tegas menyatakan bahwa mendukung pemerintah dan mulai mengambil alih kembali istana presiden. Hugo Chavez pada akhirnya kembali menduduki kursi presiden dan melanjutkan pemerintahannya (Soyomukti, 2007).

Kegagalan upaya kudeta pada april 2002 tersebut tidak menyurutkan keinginan oposisi untuk menggulingkan Hugo Chavez. Koalisi akhirnya dibentuk oleh 40 kelompok oposisi yang berbeda aliran untuk menyatukan kekuatan mereka. Mereka menamakan koalisi tersebut “Koordinator Demokratik” atau Coordinator Democratic (CD) yang berfokus untuk menuntut tanggung jawab pemerintah atas kematian para demonstran sipil dan menuntut diselenggarakannya referendum. Mereka banyak melakukan pemogokan yang membuat nilai ekspor minyak menurun drastis. Perekonomian Venezuela untuk sesaat sempat mengalami goncangan, meskipun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keputusan konstitusi. Pemerintah merespon pemogokan yang dilakukan oleh kelompok oposisi dengan memecat 13.000 – 16.000 pekerja PDVSA yang sempat membuat produksi minyak terhenti. Presiden baru PDVSA kemudian ditunjuk oleh Chavez bersamaan dengan itu pemerintah juga mengumumkan bahwa kudeta minyak berhasil dikalahkan dan Negara dalam posisi kembali menuju produksi minyak yang normal (Soyomukti, 2007). Bantuan pekerja pensiun, kontraktor asing, dan militer membuat pemerintah mampu memulai kembali perusahaan minyaknya.

2.3.2 Referendum

Kelompok oposisi terus berusaha untuk mencari cara menjatuhkan Hugo Chavez. Upaya lain yang dilakukan oleh kelompok oposisi yaitu recall referendum. Oposisi mengikuti satu-satunya rute demokratis dan konstitusional untuk menyingkirkan Hugo Chavez setelah menderita kekalahan dalam dua upaya

sebelumnya. Sejak tanggal 2 februari 2003 diakhir penutupan industri minyak, oposisi telah memulai proses untuk mengatur berbagai referendum, namun mereka mendapat kendala dari mahkamah agung karena menolak petisi mereka setelah dianggap menggunakan cara yang salah dalam perumusan petisi dan karena proses pengumpulan tanda tangan yang tidak sah.⁶ Seiring berjalannya waktu, upaya mereka akhirnya mendapat titik terang ketika pada Juni 2004 CNE⁷ mengumumkan bahwa oposisi telah memiliki tanda tangan yang suku untuk melakukan referendem dengan tujuan me-recall Chavez. Meskipun Chavez menganggap oposisi melakukan kecurangan tetapi dia tetap menerima keputusan CNE dan menyerukan para pendukungnya untuk bersiap menghadapi referendum (Raby, 2006).

Referendum sebagai upaya penggulingan Chavez akhirnya dilakukan pada tanggal 8 agustus 2004 setahun setelah oposisi melakukan kampanye. Kekuatan Chavez yang masih sangat kuat akhirnya membawanya menang dengan meraih 58% suara di senat. Kemenangan tersebut menjadi keberhasilan Chavez yang lain dalam mengatasi tantangan dalam masa pemerintahannya. Dia menjadikan kemenangan tersebut sebagai sebuah mandat yang lebih besar untuk melanjutkan perjuangan “revolusi bagi kaum miskinnya” (Pram, 2008). Kelompok oposisi yang masih belum bisa menerima kekalahan tersebut akhirnya menuntut referendum recall yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2004. Waktu tersebut mendekati batas waktu konstitusional yakni pada tanggal 19 Agustus 2004.

Oposisi yang tidak memiliki suara bulat untuk referendum recall tersebut akhirnya mengalami kekalahan lagi dengan hanya mendapatkan 40,74% suara atau 3.989 juta orang, sedangkan Chavez meraih 59,25% dari suara atau 5.800 juta orang. Hal tersebut sejalan dengan hasil polling sebelum terjadinya referendum recall berlangsung yang menunjukkan kemenangan Chavez dengan selisih antara 11% sampai 25% (Kozlof, 2008). Accion Democratica yang

⁶Presiden hanya dapat ditarik setelah setengah dari masa jabatannya telah berakhir. Mahkamah Agung memutuskan bahwa permohonan referendum demikian tidak valid. (Ada dalam pasal 72 konstitusi Venezuela)

⁷CNE (Consejo Nacional Electoral) adalah Dewan Pemilihan Umum Nasional di Venezuela

merupakan partai oposisi terbesar dan paling penting di Venezuela tampak tidak tertarik pada recall referendum, meskipun mereka ingin mencalonkan kandidat untuk melawan Chavez. Calon yang masih belum dimiliki partai AD membuat mereka lebih memilih Chavez untuk menyelesaikan masa jabatannya, sehingga mereka mempunyai waktu yang cukup untuk mencari kandidat menentang Chavez dalam pemilu 2006. Pihak oposisi Accion Democratica hanya beberapa kali melakukan promosi untuk mendukung terjadinya referendum pada masa kampanye berlangsung (Soyomukti, 2007).

Chavez kemudian mengeluarkan sebuah pernyataan setelah menang dalam proses referendum bahwa tidak ada yang merasa kalah dalam referendum.

".....yang memilih 'ya' (dalam mendukung recall) seharusnya tidak merasa dikalahkan dengan cara apapun (Chavez, 2006)."⁸

Chavez kemudian mengajak oposisi untuk bersatu membentuk persatuan nasional untuk mewujudkan realitas republik kelima dan membuat melaksanakan proyek yang terkandung dalam konstitusi bolivarian namun oposisi tidak menerima ajakan tersebut. Pada pemilu legislatif pada Desember tahun 2005 partai pimpinan Chavez berhasil menyapu bersih kursi yang ada setelah oposisi memboikot pemilu tersebut (Soyomukti, 2007).

Pemilu tahun 2006 menjadi kemenangan lain Hugo Chavez terhadap oposisi setelah kemenangan recall referendum. Dia mengalahkan lawannya Henrique Capriles Radonski yang diusung oleh partai oposisi dengan mendapatkan suara sebesar 63% (Pram, 2008). Meskipun oposisi menuduh kemenangan tersebut karena penipuan dan pemalsuan suara tapi Chavez tetap melanjutkan pemerintahannya. Langkah baru kemudian diambil oleh Chavez untuk memberikan kontinuitas untuk misi sosial, perjuangan melawan ketidakadilan, pengucilan, kemiskinan, dan meningkatkan kekuasaannya dengan melakukan perubahan terhadap konstitusi. Selama 2007, Chavez meningkatkan jumlah perwira militer di pemerintahan dan perusahaan milik negara kemudian melakukan reformasi terhadap 69 pasal pada konstitusi nasional Venezuela.

⁸Pernyataan ini disampaikan oleh Hugo Chavez di dalam pidato kemenangannya di televisi nasional

Beberapa poin penting dalam perubahan konstitusi tersebut adalah (Gamus, 2008):

1. Menambah masa jabatan presiden menjadi 7 tahun yang sebelumnya hanya 6 tahun
2. Menghilangkan aturan presiden hanya boleh menjabat selama 2 periode
3. Membatasi kekuasaan kepala daerah yang memungkinkan presiden mengubah batas-batas wilayah dan menunjuk wakil presiden
4. Membentuk dewan komunal seperti dewan komite revolusi yang ada di Kuba
5. Membatasi hak kepemilikan pribadi oleh elit-elit politik dengan mengganti peraturan tentang status hukum
6. Menunjuk militer sebagai “Bolivarian” dan mengidentifikasikannya sebagai kaum sosialis dan anti imperialisme secara resmi.
7. Menanamkan pendidikan populer dan sosialis di setiap bidang untuk menghancurkan nilai-nilai lama kapitalisme dan individualisme.

Perubahan pada konstitusi ini membuat Chavez dapat mencalonkan diri kembali sebagai presiden pada pemilu tahun 2012. Chavezpun terpilih kembali sebagai presiden pada Oktober 2012 mengalahkan saingannya dari partai oposisi dengan meraih suara 58,7% (CNE, 2013). Kondisi kesehatannya yang tidak baik membuat dirinya menunjuk Nicholas Maduro untuk memerintah hingga pada akhirnya Chavez meninggal dunia pada tahun 2013. Meninggalnya Chavez membuat Dewan Pemilihan Nasional harus segera mengadakan pemilihan umum darurat untuk mencari pengganti Hugo Chavez.

Pemilihan umum darurat yang dilakukan setelah Chavez meninggal, memenangkan Maduro dengan selisih yang sangat tipis dengan pesaingnya Henrique Capriles dari kelompok oposisi yang juga menjadi lawan Hugo Chavez pada pemilu sebelumnya. Maduro mendapatkan suara 50,61% sedangkan Capriles mendapat 49,12% suara (CNE, 2013). Selisih yang sangat tipis membuat oposisi tidak mempercayai hasilnya dan melakukan protes dengan tuduhan kecurangan, namun pada akhirnya Maduro tetap berkuasa karena menurut CNE tidak

ditemukan adanya kecurangan. Maduro berkomitmen untuk terus melanjutkan rezim sosialis Venezuela yang telah dibawa oleh pendahulunya.

2.4. Demokrasi Semu Ala Rezim Sosialis Venezuela

Demokrasi secara umum diartikan oleh Robert Dahl sebagai suatu sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan secara umum baik secara langsung maupun melalui perwakilannya, kemudian juga menekankan responsifitas pemerintah terhadap preferensi warga negaranya yang memiliki kesetaraan. Kemudian, Abraham Lincoln menjelaskan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan yang meletakkan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi dan kedaulatan (Sorensen, 2002).

Dalam melihat suatu negara telah demokratis atau belum Robert Dahl kemudian mengembangkan konsep Polyarchy. Konsep tersebut menjelaskan definisi dari demokratisasi empiris serta menguraikan kriteria-kriteria normatif untuk menilai suatu sistem politik dapat dikatakan sebagai demokrasi atau belum. Inti dari polyarchy bahwa sebuah negara dikatakan demokratis tidak hanya karena keberadaan lembaga demokrasi tapi juga adanya kelompok masyarakat dan ruang yang memadai bagi mereka untuk berorganisasi dan bermanuver. Kemudian kriteria-kriteria yang dibutuhkan oleh suatu negara demokratis menurut Dahl, yaitu:

- Terjaminnya hak pilih universal serta hak untuk mencalonkan pada jabatan publik
- Terselenggaranya pemilu yang bebas dan adil untuk semua orang dewasa
- Ketersediaan serta kepatuhan terhadap hak kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap hak tersebut
- Akses yang bebas terhadap informasi yang tidak dikendalikan pemerintah
- Adanya hak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi yang relatif otonom (tidak terikat terhadap pemerintah)
- Kontrol terhadap hasil akhir agenda yang dilakukan secara konstitusional oleh pejabat yang terpilih (independensi lembaga-lembaga negara)

- Persamaan kedudukan di depan hukum tanpa memandang kedudukan politik (Dahl, 1971).

Hal-hal tersebut diatas kemudian digunakan untuk melihat bagaimana berjalannya demokrasi yang ada di Venezuela. penulis membaginya menjadi beberapa bagian yang mencakup keseluruhan kriteria demokrasi menurut Robert Dahl.

a. Pemilu di Venezuela

Pemilihan umum di Venezuela sebenarnya telah dilaksanakan secara teratur baik di tingkat kota, regional, maupun nasional. Konstitusi 1999 juga menjamin hak pilih bagi seluruh masyarakat Venezuela. Asas *one man one votes* yang diterapkan disana juga memperlihatkan bahwa setiap masyarakat memiliki kesetaraan dalam politik. Namun dalam pelaksanaan pemilu tidaklah seperti yang dituliskan dalam konstitusi. Terdapat banyak hal yang cenderung membuat pemilihan tidak berjalan secara jujur dan adil. Mulai dari paksaan dalam memilih hingga dewan pemilihan nasional yang dikontrol oleh pemerintah.

Dewan Pemilihan Nasional Venezuela yang berwenang melaksanakan pemilu merupakan bagian dari koalisi pemerintah yang di kontrol oleh eksekutif. Mereka melaksanakan pemilihan dengan kecenderungan berpihak kepada pemerintah sehingga hasil dari pemilu pun diragukan oleh banyak kalangan. Laporan kecurangan yang ada disetiap pelaksanaan pemilu lebih sering tidak mereka proses sehingga membuat kredibilitas mereka semakin menurun. Survey yang dilakukan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 80 persen dari responden tidak mempercayai hasil dari pemilu dan meragukan kredibilitas dari dewan pemilihan nasional Venezuela (BTI, 2016).

Pemilih yang ada di Venezuela juga mengalami tekanan dalam setiap pelaksanaan pemilu. Mereka dipaksa untuk memilih/mendukung calon dari koalisi pemerintah. Sistem sidik jari yang diterapkan di Venezuela untuk mengidentifikasi pemilih dalam pemilu menjadi bagian yang semakin membuat masyarakat ketakutan terutama mereka yang mendapatkan bantuan sosial dari

pemerintah. Mereka diancam akan dicabut hak bantuan sosialnya yang akan membuat mereka kehilangan bantuan dana pendidikan, kesehatan, perumahan, dan dana pensiun jika tidak berpartisipasi dalam pemilu dan tidak memilih calon dari pemerintah. Hal tersebut dibuktikan oleh laporan yang masuk kepada Kantor Jaksa Agung Republik di Venezuela bahwa ada sekitar 100 pengaduan bahwa mereka diancam untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Majelis Konstituante Nasional (Infobae, 2017).

Pemerintah juga mengeksploitasi sumber daya yang dimiliki negara untuk menjamin dukungan yang masuk terhadap mereka. Pemerintah menyediakan kendaraan mulai dari sepeda motor hingga bus untuk menjemput pemilih dari rumah mereka agar ikut berpartisipasi dalam pemilihan dan ikut memilih calon dari koalisi pemerintah (Contraste News, 2017). Propaganda juga dilakukan oleh pemerintah untuk memojokkan lawan politik mereka dalam pemilihan. Akses calon oposisi terhadap media kampanye juga diputus oleh pemerintah baik koran maupun televisi sehingga mereka sulit untuk mempublikasikan kegiatan dan platformnya. Disisi lain, pemerintah menggunakan semua media untuk berkampanye dan membangun opini di masyarakat (BTI, 2016).

b. Pembagian kekuasaan dan lemahnya kontrol terhadap pemerintah

Konstitusi Bolivarian 1999 sudah membagi lembaga pemerintahan menjadi lima bagian seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Namun lembaga-lembaga yang lain tidak mampu memberikan kontrol terhadap eksekutif. Rezim otoriter (eksekutif) yang berkuasa mengganggu kompetensi serta menghalangi kegiatan lembaga-lembaga pemerintah yang lain yang dianggap bertentangan dengan “revolusi”. Mayoritas mereka yang mengisi kursi di parlemen merupakan bagian dari pemerintah berkuasa sehingga mereka jarang sekali melakukan fungsi legislasi dan pekerjaan yang mereka lakukan hanya berdasarkan perintah dari pemerintah berkuasa (BTI, 2016).

Eksekutif juga menguasai lembaga peradilan membuat lembaga lain tidak mampu menjalankan fungsinya sesuai ketentuan. Mereka yang berusaha untuk

melawan pemerintah harus bersiap mendapatkan hukuman ataupun digulingkan dari jabatannya. Maria Corina Machado merupakan salah satu legislator oposisi garis keras yang menampung paling banyak keluhan dari semua perwakilan dan yang mendukung protes mahasiswa pada awal 2014, digulingkan atas tuduhan palsu telah merencanakan pembunuhan presiden, serta Richardo Mardo yang juga digulingkan karena tuduhan penipuan pajak pada tahun 2013 (CPJ, 2014). Eksekutif juga menjadi kebal hukum karena kekuasaan terhadap Mahkamah Agung. Sekitar 66% dari total hakim yang ada merupakan hakim sementara yang berarti mereka dapat diangkat atau dikeluarkan oleh pemerintah. Mereka harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan karena pemerintah mengawasi mereka (BTI, 2016).

Presiden mampu menentukan kasus apa yang akan disidangkan dengan hasil yang telah dirancang. Pertemuan rutin dilakukan antara presiden dengan hakim untuk mengatur sebuah kasus yang akan diangkat ke permukaan. Sebuah studi baru-baru ini menemukan fakta bahwa 92% tantangan terhadap keputusan dari seorang hakim adalah pemecatan oleh pemerintah. Venezuela juga menjadi salah satu negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia namun sekitar 90% kasus pembunuhan tidak dihukum, bahkan berdasarkan statistik Kantor Kejaksaan Agung sendiri 99% keluhan hak asasi manusia tidak sampai ke tahap uji coba (BTI, 2016).

Setelah lembaga legislatif dikuasai oleh kelompok oposisi setelah menang dalam pemilu 2015, pemerintah justru berusaha untuk menghilangkan fungsi badan tersebut dengan membentuk Lembaga Konstituante Nasional (ANC). Pemerintah melaksanakan pemilu yang nantinya memilih orang-orang yang akan menduduki lembaga baru tersebut. Penempatan posisi di lembaga tersebut menggunakan sistem delegasi dimana masing-masing kota memiliki satu perwakilan, sedangkan ibu kota dua perwakilan, dan Caracas tujuh perwakilan. Wewenang dari lembaga tersebut sangatlah besar yaitu mampu merubah konstitusi dan memberhentikan semua aparatur negara (BTI, 2016).

Pelaksanaan pemilu tersebut menjadi masalah serius untuk representasi partisan yang menghapus sisa-sisa nilai representasi dan proporsionalitas. Prinsip-prinsip kesetaraan dan universalitas suara yang menjadi prinsip dasar demokrasi telah dilanggar dengan pelaksanaan pemilu tersebut. Proporsi suara politik sangat berbeda dan tergantung pada tempat pemilih yang tinggal. Daerah pemilihan dengan total 64 persen populasi yang tinggal di 23 kota dan Distrik Federal hanya memiliki kuota 9,72 persen, sedangkan sisanya yang hanya 36 persen dari total populasi mendapat jatah 90,28 persen (Almagro, 2017).

Hasil dari pemilu ANC tersebut semakin menegaskan terkikisnya demokrasi di Venezuela. Seluruh kursi yang ada di majelis tersebut dikuasai oleh koalisi pemerintah termasuk istri dari Nicholas Maduro. Wewenang yang dimiliki oleh lembaga ini digunakan oleh pemerintah untuk semakin memperkuat kontrolnya terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Mereka memberhentikan anggota tetap Mahkamah Agung yang mengeluarkan keputusan tidak sejalan dengan keinginan pemerintah sehingga semakin terkikis netralitas dari keputusan lembaga peradilan yang ada di Venezuela (Almagro, 2017).

c. Pencederaan Hak-Hak Dasar Untuk Berpendapat Dan Berserikat

Kebebasan berpendapat menjadi salah satu aspek yang dijamin dalam konstitusi Venezuela. Namun pada penerapannya, hal tersebut tidaklah berjalan dengan seharusnya. Pemerintah secara sistematis telah mencederai hak-hak masyarakat untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan berserikat. Setidaknya sudah ada 2 juta pengungsi, 645 tahanan politik, penyiksaan terhadap tahanan, 130 orang dibunuh dalam demonstrasi, 16.000 orang terluka, serta 54% anak-anak kekurangan gizi (OAS, 2017).

Pemerintah cenderung menanggapi setiap protes yang muncul dengan menggunakan kekerasan dan teror melalui pasukan bersenjata baik dari militer maupun milisi. Sejak masa Hugo Chavez, pemerintah telah mensponsori pasukan sipil bersenjata yang mereka bentuk dengan dasar untuk melindungi revolusi. Penerus dari Hugo Chavez yaitu Nicholas Maduro semakin memperkuat pasukan

milisi tersebut dengan menambah pasukan menjadi satu juta orang dan memberikan mereka senapan untuk menanggapi demonstrasi (El Pais, 2017). Berdasarkan laporan dari kantor kejaksaan agung Venezuela, setidaknya 40% kematian pada protes nasional tahun 2017 disebabkan oleh keterlibatan pasukan sipil bersenjata ini (PSCP, 2017).

Kebebasan untuk berekspresi dijamin didalam konstitusi, namun dalam prakteknya hal tersebut sangat dibatasi. Pemerintah dengan sengaja mensponsori kelompok-kelompok bersenjata non militer untuk menghentikan protes di masyarakat. Mereka bertanggung jawab terhadap pembunuhan selama protes mahasiswa pada bulan Februari-Maret 2014 (CPJ, 2014). Logika dasar pemerintah menekankan bahwa negara (pemerintah, dan elit penguasa) harus mendapat perlindungan dari warga negara. Kebebasan berekspresi dianggap sebagai resiko bagi “keamanan publik” dan merupakan potensi destabilisasi yang harus mendapat kontrol dari pemerintah. Pada akhirnya, pemerintah menekan masyarakat yang mengekspresikan ketidakpuasan mereka dan melakukan protes (BTI, 2016).

PROVEA, sebuah organisasi hak asasi manusia mengeluarkan laporan tentang pelanggaran hak untuk protes pada tahun 2014. PROVEA menuliskan bahwa lebih dari 600 protes pada bulan Februari dan Maret saja ditekan oleh pemerintah dengan kekuatan yang berlebihan, itu termasuk hampir 50 kasus penindasan oleh preman sipil yang disponsori pemerintah (BTI, 2016). Lembaga tersebut juga melaporkan bahwa lebih dari 400 serangan dilakukan oleh pasukan bersenjata kepada warga dirumah mereka. Serangan yang sebagian besar dilakukan oleh warga sipil bersenjata lebih banyak menggunakan zat beracun yang sebenarnya dilarang di dalam negara tersebut (BTI, 2016). Salah seorang jenderal militer berusaha untuk menghentikan tindakan mereka dengan membawa kasusnya ke pengadilan namun pada akhirnya dia kalah dan dipecat (CPJ, 2014).

Kebebasan untuk berkumpul dan berserikat juga dilanggar oleh pemerintah. Pada bulan Februari dan Maret tahun 2014, pemerintah menekan protes yang dilakukan mahasiswa baik oleh aparat berseragam dan milisi yang

disponsori oleh pemerintah. Lebih dari 40 korban tewas dalam kejadian tersebut, ratusan orang mengalami luka-luka dan ribuan orang ditangkap. Pemerintah juga mengekang LSM-LSM yang ada di Venezuela dengan melakukan pelarangan untuk menerima bantuan keuangan dari dunia internasional. Akses dari asosiasi pemantauan hak-hak sipil terhadap sumber-sumber informasi resmi dibatasi oleh serangkaian birokrasi yang membuat mereka kesulitan untuk memperoleh hasil yang kompatibel (BTI, 2016).

d. Kontrol Pers

Media massa menjadi bagian penting dari demokrasi yang berfungsi sebagai bagian kontrol terhadap pemerintah. Konstitusi Bolivarian sendiri pada pasal 57 telah menjamin adanya kebebasan berekspresi (Konstitusi Bolivarian, 1999). Namun dalam prakteknya hak-hak yang harus diterima oleh masyarakat tidaklah dihormati. Pemerintah semakin memperkuat kontrolnya terhadap media massa atas logika dasar bahwa negara harus dilindungi dari upaya pemecah belah bangsa. Pada tahun 2004, anggota parlemen yang setia kepada Chavez mengesahkan undang-undang penyiaran baru yang melarang konten yang dianggap terlalu keras, mengandung unsur seksual untuk anak-anak, menghasut atau mempromosikan kebencian atau intoleransi dan ketidaktaatan tatanan hukum. Pemerintah kemudian memperluas undang-undang tersebut pada tahun 2010 yang mencakup internet sehingga mereka dapat memesan kepada penyedia layanan internet untuk membatasi situs-situs yang melanggar kontrol.

Reformasi peraturan pidana oleh pemerintah pada tahun 2005 semakin mempertegas kontrol pemerintah terhadap pers yang ada di Venezuela. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penghinaan yang mengarah kepada presiden dianggap sebagai sebuah tindak pidana dan akan dijatuhkan hukuman penjara hingga 30 bulan (freedomhouse, 2016). Pemerintah juga membentuk badan-badan khusus untuk mengontrol pers yang ada di Venezuela. Pertama mereka membentuk Komisi Telekomunikasi Nasional (CONATEL) pada tahun 2000 yang berfungsi untuk mengontrol kualitas informasi yang muncul di media komunikasi

(Bnamericas, 2017). CONATEL merupakan sebuah badan otonom yang berfungsi untuk menertibkan media massa yang ada di Venezuela. Mereka memiliki wewenang untuk memberikan atau mencabut lisensi dari lembaga penyiaran yang kemudian setelah amandemen UU Resorte pada tahun 2010 mereka juga berhak mengatur aktivitas internet yang ada di negara tersebut (Almagro, 2017).

Wewenang tersebut menjadi alat untuk mengontrol setiap hal yang dilakukan oleh pers yang ada di Venezuela. Dengan menggunakan CONATEL, Pemerintah menahan liputan-liputan dari wartawan swasta tentang berita nasional maupun internasional dengan menjatuhkan denda yang berat kepada televisi swasta dan berbagai media cetak. Pada tahun 2015 saja setidaknya pemerintah telah menggunakan lembaga tersebut sebanyak 147 kali untuk menghentikan berbagai informasi yang tidak sejalan dengan pemerintah (Almagro, 2017). Pemerintah juga menggunakan CONATEL untuk mencabut lisensi dari beberapa media independen mulai dari radio hingga stasiun televisi yang membuat mereka kehilangan hak untuk melakukan liputan. Setidaknya ada 300 stasiun radio serta beberapa stasiun televisi yang kehilangan lisensinya pada tahun 2015 (Almagro, 2017).

Pemerintah juga kembali membentuk sebuah badan khusus pada tahun 2013 yang bertanggung jawab langsung terhadap presiden untuk menyensor setiap informasi yang dianggap berbahaya bagi keamanan nasional. Badan khusus tersebut diberi nama “Pusat Strategis untuk Perlindungan dan Keamanan Negara (CESPPA)”. Badan khusus ini digunakan oleh pemerintah untuk membatasi setiap pemberitaan yang memojokkan pemerintah dan menghalangi masyarakat untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di Venezuela. Hal tersebut dibuktikan dengan seruan Presiden Maduro untuk menghukum media yang melaporkan tentang kondisi kekurangan yang terjadi di Venezuela dengan logika bahwa informasi tersebut dianggap mengancam keamanan dan keutuhan nasional (BTI, 2016). Wartawan juga semakin terhambat oleh keputusan pengadilan yang membatasi publikasi foto kematian atau kekerasan (CPJ, 2014). Hal tersebut

membuat informasi publik sulit untuk diakses oleh masyarakat (freedomhouse, 2016).

Lembaga peradilan yang dikuasai oleh pemerintah semakin membuat akses terhadap informasi semakin terbatas. Sistem peradilan dipolitisasi oleh pemerintah di semua tingkat, sehingga wartawan dan media swasta tertekan dengan berbagai kasus yang dituduhkan terhadap mereka. Beberapa keputusan hakim yang menunjukkan keberpihakannya terhadap pemerintah diantara ketika Hakim Maria Eugenia Núñez menghukum 22 pemilik, editor, dan lainnya yang terkait pelaporan oleh Diosdado Cabello yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah. Kemudian Mahkamah Agung juga telah menolak keputusan IACHR untuk mengembalikan hak siar RCTV yang menjadi salah satu media independen di Venezuela (Almagro, 2017).

Ketika periode mendekati pemilu terlihat sekali bagaimana peran kontrol pemerintah terhadap media massa. Seluruh media hanya memberikan ruang kepada calon dari koalisi pemerintah untuk melakukan kampanye. Studi yang dilakukan oleh COP Observasi Komunikasi dan Demokrasi Global (OGCD) di Venezuela untuk menganalisis liputan yang ada selama masa preelection di surat kabar publik maupun swasta, radio, serta televisi menunjukkan bahwa hampir secara keseluruhan pemberitaan yang muncul adalah pro pemerintah, sedangkan oposisi memiliki ruang yang sangat minim. Institut Pers dan Masyarakat Venezuela (IPYS) pun mengkonfirmasi bahwa seluruh konten dalam media publik sangat mengarah kepada kepentingan pemerintah (Freedomhouse, 2016). Ketika pemilu berlangsung, pemerintah melarang para wartawan untuk meliput kondisi langsung di tempat pemungutan suara. Para wartawan harus berada 500 meter dari tempat pemungutan suara yang hal tersebut diawasi oleh pasukan bersenjata (Almagro, 2017).

Pemerintah juga melakukan teror terhadap kelompok wartawan yang berusaha memberikan liputan tentang kondisi sebenarnya yang ada di Venezuela. Para wartawan mendapatkan penyerangan, penyitaan bahkan ada beberapa yang mengalami perampokan yang diduga dilakukan oleh kelompok suruhan

pemerintah. Laporan IPYS pada tahun 2015 menunjukkan sedikitnya ada 391 serangan terhadap wartawan dalam periode setahun. Serangan-serangan tersebut berupa ancaman, penghancuran informasi dan materi, intimidasi, serta penyensoran (Freedomhouse, 2016).

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara prosedural, Venezuela bisa dikatakan sebagai negara yang demokratis. Dengan konstitusi bolivarian tahun 1999 mereka membuat tatanan negara menjadi sangat terlihat demokratis. Mereka melakukan pembagian kekuasaan yang sangat baik dengan adanya eksekutif, legislatif, yudikatif, serta dewan pemilu. Kemudian mereka juga melakukan pemilu langsung dengan sistem *one man one votes* yang memperlihatkan bahwa setiap masyarakat memiliki kesetaraan dalam politik. Namun secara substansial, Venezuela belumlah bisa dikatakan sebagai negara demokratis. Rezim otoriter (eksekutif) yang berkuasa mengganggu kompetensi serta menghalangi kegiatan lembaga-lembaga pemerintah yang lain yang dianggap bertentangan dengan “revolusi”(BTI, 2016). Selanjutnya krisis ekonomi di Venezuela yang diuraikan pada bab 3 nantinya akan menjadi pemicu terhadap munculnya tuntutan demokratisasi di negara tersebut.

BAB 3 KRISIS EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP BERBAGAI SEKTOR

3.1 Krisis Ekonomi

Venezuela mengalami gejolak dalam perekonomiannya setelah harga minyak mengalami penurunan drastis pada tahun 2014. Pembangunan dan perkembangan ekonomi yang terjadi pada periode pemerintahan sebelumnya mulai anjok menuju kepada krisis. Ketergantungan yang sangat besar terhadap industri minyak membuat Venezuela tidak bisa menghindari gejolak ekonomi yang terus berlangsung.

Grafik 3.1: Harga Minyak Dunia



Sumber: tradingeconomics.com

Pada tahun 2013 hingga pertengahan 2014 harga minyak dunia mencapai angka 100 US dollar per barel yang membuat perekonomian mereka sempat naik, namun pada akhir tahun 2014 kemerosotan harga minyak dunia mulai terjadi hingga terjun bebas dan mencapai angka dibawah 30 US dollar per barel yang menjadikan perekonomian Venezuela terhimpit dalam krisis.

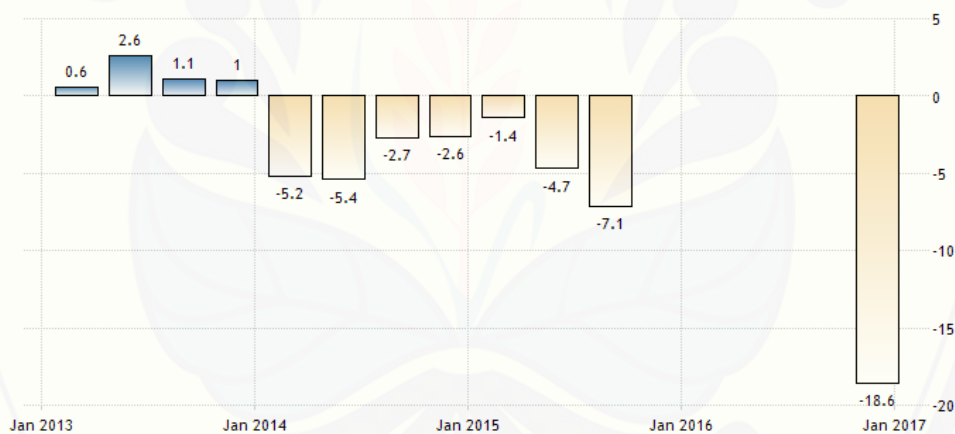
Minyak menjadi sumber utama dalam pembiayaan program-program pemerintah yang beraliran sosialis ini. Investasi yang ada mulai dialihkan kepada sektor minyak hingga mendominasi pendapatan ekspor mereka. Sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia hal tersebut memang cukup membantu program-program pemerintah yang membutuhkan dana sangat besar untuk

program-program sosialnya, namun ketika harga minyak turun dampaknya sangat terasa terhadap negara tersebut. PDB negara mulai menurun, inflasi meningkat, devisa negara mulai menipis dan hutangpun meningkat.

3.1.1 Penurunan PDB Venezuela

Pendapatan negara ini sangat terpuak ketika harga minyak jatuh drastis. Dominasi dari pendapatan minyak yang mencapai 96 persen dari penghasilan ekspor atau sekitar 12 persen dari PDB memberikan pukulan telak terhadap Pertumbuhan ekonomi Venezuela yang turun hingga 5,10 persen pada awal 2014 seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.2: PDB Venezuela



Sumber: tradingeconomics.com

Grafik diatas menunjukkan penurunan PDB Venezuela sudah mencapai minus 5,2 persen pada awal tahun 2014 dan turun 0,2 persen di kuartal berikutnya. Pada tiga kuartal selanjutnya PDB Venezuela sempat mengalami perbaikan hingga mencapai titik minus 1,4 persen namun, pada kuartal selanjutnya penurunan terus terjadi. Akhir Desember 2015 Bank Venezuela tidak mengeluarkan laporan tentang PDB yang ada sehingga tidak ditemukan data resmi sampai pada akhir tahun 2016 sudah diketahui penurunan drastis pada PDB Venezuela yang mencapai minus 18,6 persen.

Keputusan bank Venezuela yang jarang mengeluarkan laporan resmi tentang laju PDB di Venezuela membuat kesulitan untuk melihat bagaimana pergerakan perekonomian di Venezuela. Namun, berdasarkan laporan terbaru dari IMF dalam World Economic Outlook menjelaskan bahwa pada tahun 2017 ini PDB Venezuela menyusut 12 persen dari tahun sebelumnya dan diperkirakan akan terus berkontraksi 6 persen pada tahun depan (IMF, 2017).

3.1.2 Meningkatnya Inflasi Dan Menurunnya Nilai Tukar

Inflasi terus meningkat di Venezuela menyusul dengan penurunan PDB yang terjadi. Belanja pemerintah, kenaikan upah minimum, dan peningkatan akses kredit domestik semakin mendorong meningkatnya inflasi di negara tersebut. Pemerintah juga terus menyerukan kepada bank negara untuk memproduksi uang membiayai defisit fiskal sekitar 20 persen dari PDB, namun hal tersebut semakin membawa nilai uangnya terpuruk. Nilai mata uang menurun signifikan yang membuat selembar uang pecahan nilai tertinggi di negara tersebut hanya dapat membeli satu pak permen karet isi lima.

Grafik 3.3: Tingkat Inflasi Di Venezuela



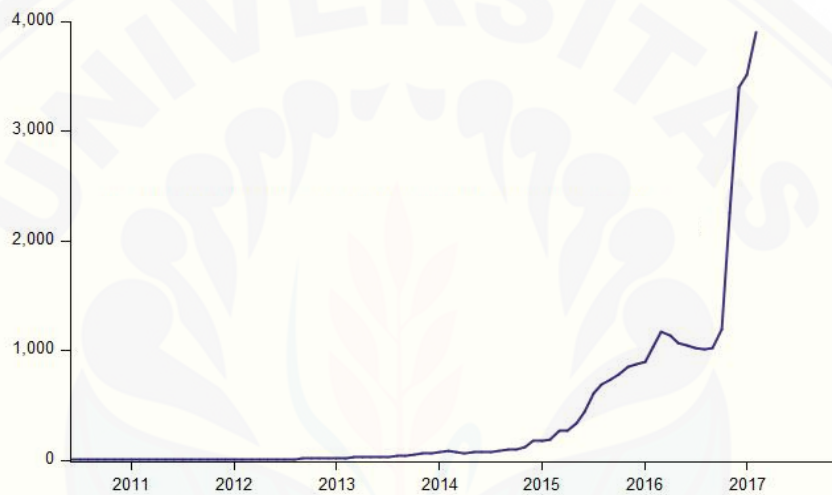
Sumber: tradingeconomics.com

Grafik diatas menunjukkan bagaimana inflasi yang terjadi di Venezuela terus naik dari tahun ke tahun. Pada awal tahun 2014 inflasi masih di bawah 100 persen namun hal tersebut terus naik. Laju inflasi paling tajam yaitu dari tahun 2016 hingga 2017 yang membuat tingkat inflasi tertinggi pada angka 800 persen.

Inflasi yang terjadi di Venezuela menjadi yang tertinggi di dunia saat ini. Menurut analisis dari IMF, inflasi di Venezuela akan terus berlanjut yang diperkirakan melebihi angka 2.300 persen pada tahun 2018 (IMF, 2017).

Nilai tukar mata uang Venezuela terhadap dollar terus mengalami penurunan. Seiring dengan berjalannya inflasi, mata uang bolivar semakin melemah.

Grafik 3.4: Nilai Tukar Bolivar Terhadap Dollar AS



Sumber: (<https://www.aier.org/research/venezuela-socialism-hyperinflation-and-economic-collapse>)

Nilai tukar mata uang bolivar terhadap dollar dimulai dengan nilai yang hampir sama pada tahun 2011. Hal tersebut terus berlangsung hingga tahun 2014 nilai bolivar mulai melemah diangka 10 bolivar untuk 1 US dollar. Penurunan nilai bolivar terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Grafik diatas juga memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan terjadi diakhir tahun 2016 menuju 2017 dimana 1 US dollar telah mencapai 4000 bolivar. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam sejarah (AIER, 2017).

Menurunnya nilai tukar dari mata uang bolivar membuat Presiden Nicholas Maduro menyerukan kepada masyarakat Venezuela untuk menukarkan uang kertas pecahan 100 bolivar menjadi uang logam dengan nilai yang sama pada akhir 2016. Pengumuman tersebut dilakukan setelah pemerintah negara itu

menyatakan untuk menghapuskan uang kertas 100 bolivar karena nilainya yang sudah sangat rendah. Pemerintah kemudian menggantinya dengan enam uang kertas lainnya yang bernilai 500 hingga 20.000 bolivar atau setara 5 US dollar. Pemerintah memberikan waktu 72 jam untuk masyarakat melakukan penukaran (Hardoko, 2016). Masyarakatpun membuat antrian panjang untuk melakukan penukaran, namun hingga batas waktu yang ditetapkan pemerintah, pendistribusian uang belum dilakukan baik di kantor bank maupun mesin-mesin ATM. Masalah tersebut menunjukkan bagaimana kekacauan ekonomi parah yang sedang dihadapi Venezuela.

Mata uang tertinggi Venezuela yang baru dikeluarkan yaitu 20.000 pada awalnya sangat cukup untuk memenuhi segala kebutuhan pokok seperti beras, gula, tepung, pasta dan kopi. Akan tetapi, hanya dalam beberapa minggu hal tersebut tidak berlaku lagi, dengan uang yang sama hanya mampu membeli sepertiga dari kebutuhan yang biasanya mampu didapatkan secara lengkap. Harga secangkir kopi saja mencapai 2.800 bolivar yang naik 22 persen dari harga sebelumnya (News, 2017).

3.1.3 Meningkatnya Hutang

Venezuela sempat berhasil melunasi hutangnya terhadap IMF dan Bank Dunia di awal terbentuknya rezim sosialis. Namun, hutang Venezuela kembali mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir karena kebutuhan yang sangat besar untuk program-program sosial dari rezim sosialis sendiri. Dana besar yang dibutuhkan tidak diimbangi dengan pendapatan mereka yang mengalami penurunan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari pinjaman kepada negara-negara yang menjadi mitranya. Menurut Torino Capital, Total hutang luar negeri pemerintah dan entitas negara Venezuela mencapai 143 miliar US dollar dengan sekitar 52 miliar US dollar berupa obligasi. Sebagian besar hutang luar negeri Venezuela akan jatuh tempo pada akhir tahun ini hingga tahun depan (Porzecanski, 2017).

Hutang yang sangat tinggi tersebut membuat pemerintah kesulitan untuk melunasinya bahkan presiden Nicholas Maduro mengumumkan bahwa

pembayaran pokok obligasi sebesar \$ 1,1 miliar dari PDVSA perusahaan minyak negara telah jatuh tempo (Ellsworth, 2017). Venezuela mengalami kesulitan untuk membayar hutang yang mereka alami karena sumber penghasilan utamanya sedang bermasalah dan juga diperburuk dengan sanksi yang dikeluarkan oleh AS. Harga minyak yang turun drastis membuat presiden Maduro mengambil keputusan untuk mengurangi produksi minyak demi menghindari kerugian yang mereka tanggung.

Grafik 3.5: Produksi Minyak Venezuela



Sumber: tradingeconomics.com

Produksi minyak pada awal tahun 2014 masih berada diatas 2,8 juta barrel per hari, namun dipertengahan tahun produksinya langsung turun drastis yaitu berada diangka 2,3 juta barrel per hari. Meskipun ada peningkatan produksi di akhir tahun 2014, hal tersebut tidak berlangsung lama. Produksi minyak Venezuela terus menurun setiap tahunnya hingga mencapai titik terendah diangka 2,1 juta barrel per hari pada tahun 2017.

Berkurangnya produksi minyak tersebut memberika dampak yang sangat signifikan terhadap laju hutang Venezuela. Beberapa negara yang melakukan kerjasama dengan Venezuela menggunakan minyak sebagai salah satu alat

pembayarannya, sehingga ketika produksi minyaknya berkurang mereka kesulitan menemukan alat pembayaran. Presiden Maduro terus berusaha melakukan renegosiasi untuk menemukan jalan keluar bagi pembayaran hutang Venezuela yang sebagian besar jatuh tempo pada akhir 2017. Pemerintah terus berupaya untuk meyakinkan kreditor bahwa mereka akan membayar hutang mereka seperti biasanya namun, mereka seolah menemui jalan buntu dan menyalahkan sanksi yang dijatuhkan oleh AS kepada Venezuela (Ellsworth, 2017).

Sanksi yang dijatuhkan AS kepada Venezuela menyulitkan penggalangan dana dari investor internasional, dan secara efektif melarang refinancing atau restrukturisasi hutang yang ada dengan cara menghalangi lembaga yang diatur AS untuk membeli obligasi baru. Pasar obligasi pun menjadi terbawa dalam kondisi yang buruk yang membuat harga obligasi di negara tersebut mengalami penurunan. Banyak obligasi yang diperdagangkan di bawah 30 sen, bahkan ahli strategi Bank of America Corp. mengatakan bahwa harga bisa turun hingga 20 sen.

3.1.4 Menipisnya Devisa Negara

Beban yang harus ditanggung pemerintah untuk berbagai kegiatan membuat cadangan devisa mereka terkuras. Hutang yang mulai mendekati jatuh tempo dan kebutuhan terhadap uang tunai untuk melaksanakan program-program sosial dari rezim sosialis membuat mereka mengambil keputusan untuk menggunakan cadangan devisanya. Bank sentral Venezuela pernah menukar cadangan emasnya dengan uang tunai sebesar 1 miliar US dollar yang menunjukkan bagaimana urgensi dari kebutuhan uang tunai di negara tersebut. Berdasarkan data dari Russ Dallen of investment bank Caracas Capital Markets, Venezuela beserta perusahaan minyak negara harus melunasi hutang pokok dan bunga sebesar 6 miliar US dollar pada tahun 2016 (Ellsworth, 2017).

Emas menjadi cadangan devisa terbesar dari Venezuela yaitu mencapai 70 persen dari total keseluruhan. Venezuela sendiri menempati peringkat 16 sebagai negara yang mempunyai cadangan emas terbesar di dunia yaitu sekitar 367 ton. Namun, sejak tahun 2015 Venezuela memutuskan untuk menjual cadangan

emasnya demi memenuhi kebutuhan mereka. Dibawah ini terlihat bagaimana pergerakan cadangan devisa Venezuela sejak tahun 2015 (Porzecanski, 2017).

Grafik 3.6: Cadangan Devisa Venezuela



Sumber: tradingeconomics.com

Tahun 2015 cadangan devisa Venezuela masih berada diangka yang cukup tinggi yaitu 24 miliar US dollar. Namun, dalam semester pertama tahun tersebut saja mereka sudah kehilangan sekitar 8 miliar US dollar yang membuat cadangannya berada pada posisi 16 miliar US dollar. Penurunan terus terjadi hingga mencapai titik terendah pada tahun 2017 yang hanya tersisa 10 miliar US dollar. Berdasarkan data IMF yang dimuat di majalan Financial Times menunjukkan bahwa rata-rata setiap bulannya negara ini menjual sekitar 20 ton cadangan emasnya, yang membuat mereka kehilangan sekitar sepertiga cadangannya hanya dalam setahun (IMF, 2017).

3.2 Penyebab Krisis Ekonomi Venezuela

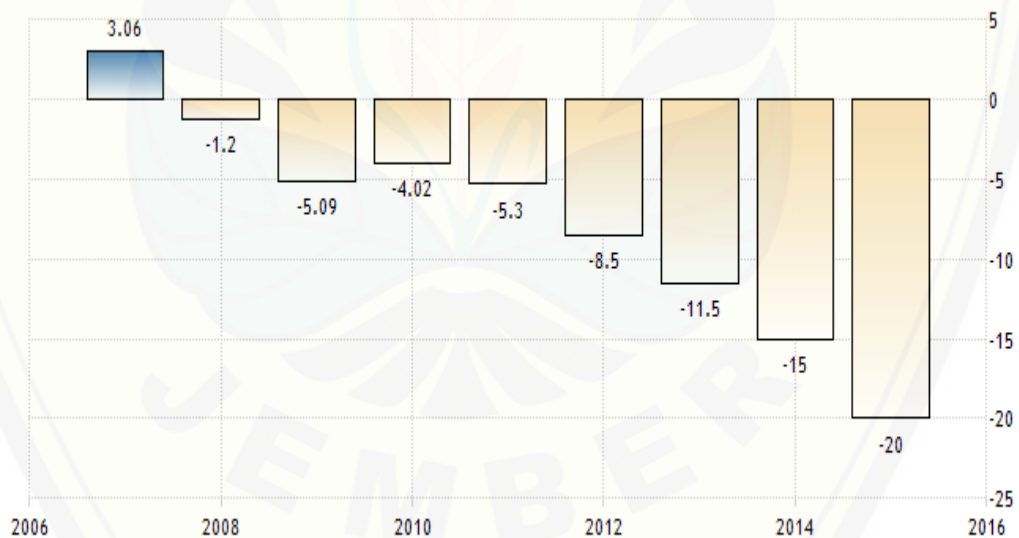
3.2.1 Kontrol Perekonomian Dan Korupsi Yang Tinggi

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di Venezuela. Kebijakan pertama yang sangat berpengaruh yaitu nasionalisasi (CFR, 2017). Para ahli mengatakan kebijakan pengambilalihan yang meluas atau nasionalisasi telah mengurangi produktivitas.

Pemerintah mengendalikan lebih dari lima ratus perusahaan yang telah mereka ambil alih. Banyaknya perusahaan yang dikuasai oleh pemerintah cenderung mendorong korupsi semakin meningkat dan hal tersebut terjadi di Venezuela. Transparency International menempatkan Venezuela di posisi 166 sebagai negara terkorup dari 176 negara (Transparency, 2017). Posisi tersebut menunjukkan betapa parahnya tingkat korupsi yang terjadi di Venezuela. Tingginya korupsi membuat perusahaan-perusahaan yang dikuasai pemerintah tidak berjalan dengan baik sehingga sebagian besar perusahaannya mengalami kerugian dalam operasinya.

Kebijakan-kebijakan pemerintah Venezuela untuk program-program sosialnya cenderung menghabiskan dana yang sangat besar sehingga mengalami defisit anggaran.

Grafik3.7: Anggaran Belanja Pemerintah



Sumber: tradingeconomics.com

Sejak tahun 2008, pemerintah Venezuela tidak dapat membiayai penuh anggaran negaranya. Hasilnya, defisit anggaran terus membengkak dari minus 1,2 persen terhadap pendapatan tahun 2008 terus mengalami peningkatan hingga mencapai

minus 20 persen pada tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan betapa buruknya pemerintah dalam mengurus perekonomiannya.

Kebijakan kedua yaitu kontrol harga yang dilakukan pemerintah terhadap barang-barang kebutuhan dasar (CFR, 2017). Tujuan dasar yang baik agar warga miskin dapat membeli kebutuhan mereka membawa dampak baik disisi lainnya. Seolah lupa bahwa dalam prinsip ekonomi, profit menjadi hal yang sangat penting pemerintah terus memberlakukan kebijakan tersebut tanpa berharap untung. Biaya produksi yang semakin tinggi akhirnya membuat produsen memangkas produksi mereka. Barang-barang yang beredar dipasarpun semakin berkurang dan memberikan masalah kepada roda perekonomian. Masyarakat memiliki uang tapi barang minim, sehingga harganya pun menjadi melonjak drastis (CFR, 2017).

Kebijakan lain yang berkontribusi terhadap permasalahan ekonomi di Venezuela adalah kontrol terhadap nilai tukar mata uang. Kebijakan ini sebenarnya diperkenalkan oleh Hugo Chavez pada tahun 2003 dengan tujuan untuk mengurangi arus modal (CFR, 2017). Pemerintah memberikan harga khusus kepada beberapa pihak untuk mendapatkan dollar. Tujuan yang pada dasarnya baik malah menciptakan pasar gelap dan meningkatkan terjadinya korupsi. Misalnya, bisnis yang diberi otoritas mendapatkan dollar dengan harga istimewa untuk membeli barang prioritas seperti makanan atau obat-obatan dapat menjual dolar tersebut untuk keuntungan signifikan bagi pihak ketiga. Hal tersebut karena ketimpangan yang sangat jauh dari harga pemerintah dan harga di pasar gelap. Nilai tukar resmi untuk dollar dari pemerintah hanya sepuluh bolivars sedangkan di pasar gelap harganya bisa mencapai delapan ribu bolivars (Dolartoday, 2017).

3.2.2 Instabilitas Politik

Kemenangan Nicholas Maduro sebagai presiden pada pemilu tahun 2013 pada dasarnya tidak diterima oleh kelompok oposisi. Mereka menolak hasil yang dikeluarkan oleh dewan pemilu Venezuela. Margin yang sangat tipis memang semakin menjadikan oposisi terus menekan untuk diadakannya perhitungan ulang. Mereka mengklaim bahwa telah terjadi banyak kecurangan dalam proses pemilu

darurat yang dilaksanakan karena meninggalnya Hugo Chavez sebagai pemenang pemilu di tahun sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu dengan berat hati kelompok oposisi akhirnya mereka menerima hasil dari pemilu tersebut.

Kelompok oposisi tetap melakukan tekanan terhadap pemerintahan Nicholas Maduro meskipun mereka menyetakan menerima hasil pemilihan. Sesekali mereka mempengaruhi masyarakat untuk semakin menjauh dari pemerintah. Turunnya harga minyak di tahun 2014 membuat perekonomian venezuela terpukul dan dijadikan sebagai momentum oleh kelompok oposisi untuk menekan pemerintah. Mereka berusaha mengembangkan pandangan bahwa pemerintah telah gagal mengelola perekonomiannya sehingga mereka terpuruk.

Pada pemilu legislatif yang diadakan tahun 2015 partai oposisi *Democratic Unity* berhasil memenangkannya dengan merebut 109 kursi di kongres, sangat jauh dengan yang diperoleh oleh parta pemerintah yang hanya mendapatkan 55 kursi. Kemenangan tersebut membuat 65 persen kongres dikuasai oposisi yang berarti mereka dapat memecat kabinet Maduro dan meloloskan reformasi yang tidak bisa dibatalkan Maduro (Aljazeera, 2015). Kemenangan ini merupakan kemenangan pertama kelompok oposisi semenjak pemerintahan dikuasai oleh rezim sosialis yang dibawa Hugo Chavez. Dalam sejarahnya, instabilitas politik selalu memberikan dampak buruk terhadap perekonomian, begitupula yang terjadi di Venezuela.

3.2.3 Krisis Listrik

Kekurangan pasokan listrik semakin memperparah kondisi perekonomian Venezuela. Listrik menjadi salah satu faktor penting yang menjadi penggerak perekonomian suatu negara karena hampir semua peralatan membutuhkan listrik untuk difungsikan. Krisis listrik di Venezuela sendiri disebabkan oleh badai El Nino yang sedang melanda Venezuela. Badai tersebut menyebabkan banyak pembangkit listrik di Venezuela yang tidak berfungsi.

Pasokan utama listrik Venezuela sebagian besar diperoleh dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang mencapai 60 persen dari total kebutuhan listrik Venezuela. Kondisi yang sangat ironis mengingat Venezuela sebenarnya

merupakan salah satu negara penghasil minyak terbanyak di dunia, namun tidak menggunakan generator diesel untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Salah satu bendungan yang menyumbangkan listrik sangat besar yaitu bendungan Guri Dam. Bendungan tersebut dibangun sejak tahun 1970-an dan mampu menghasilkan 10.300 megawatt listrik, namun PLTA tersebut mulai berkurang fungsinya dan terus menurunkan pasokan listrik yang diberikan karena level debit air yang sangat rendah.

Krisis listrik yang terjadi di Venezuela menyebabkan berbagai permasalahan diantaranya banyak gerai yang tutup meskipun di siang hari dan lampu yang padam juga menghiasi hampir diseluruh wilayah Venezuela. Mesin-mesin ATM juga tidak berfungsi sehingga masyarakat kesulitan untuk menarik uang dan membeli kebutuhan pokoknya. Banyaknya gerai yang tutup menyebabkan antrian panjang di beberapa toko yang masih buka.

Pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meminimalisir dampak dari krisis listrik yang terjadi diantaranya mengurangi jam kerja PNS hingga pelarangan penggunaan *hairdryer* (pengering rambut) (Leatherby, 2017). Kebijakan tersebut semakin membuat produktivitas dari para pegawai negeri berkurang dan memperlihatkan bagaimana negara ini sudah menjadi setengah lumpuh akibat minimnya pasokan listrik. Pelayanan-pelayanan kesehatan juga terganggu dengan keadaan yang terjadi. Penerangan yang minim membuat beberapa kota seperti mati ketika malam hari.

3.2.4 Krisis Makanan Dan Obat-Obatan

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk merampingkan impor sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang melanda negara tersebut. Kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan yang sebagian besar didapat dari impor mulai mengalami permasalahan. Jumlah makanan yang beredar sangat minim bahkan banyak toko yang tutup karena tidak memiliki apapun untuk dijual. Produsen yang berhenti memproduksi barang dan minimnya barang impor merupakan faktor-faktor yang mengikis persediaan makanan di Venezuela.

Obat-obatan dan perlengkapan medis juga mengalami permasalahan yang sama. Sebuah studi yang dilakukan oleh Dokter Kesehatan (Médicos por la Salud), jaringan profesional lebih dari 200 dokter medis, dan kelompok non-pemerintah Observatorium Venezuela Venezolano de la Salud) pada tahun 2016 terhadap 86 rumah sakit umum di 38 kota di seluruh Venezuela menemukan hasil yang sangat mengejutkan. Sebanyak 76 persen rumah sakit mengalami kekurangan Obat-obat dasar yang telah dimasukkan WHO dalam Daftar Obat-obatan Penting yang harus tersedia di rumah sakit umum fungsional, bahkan ada beberapa rumah sakit yang tidak memiliki stok. Ini menunjukkan peningkatan dari 55 persen rumah sakit pada tahun 2014, dan 67 persen pada tahun 2015. Survei tersebut juga menemukan bahwa terdapat kekurangan pasokan peralatan bedah di 81 persen rumah sakit, meningkat dari 57 persen di tahun 2014 dan 61 persen pada tahun 2015 (hrw, 2016).

Kekurangan obat-obatan dan persediaan juga terjadi pada apotek swasta negara tersebut, menurut para dokter dan pasien yang diwawancarai oleh Human Rights Watch. Presiden Federasi Apotik Venezuela memperkirakan pada bulan Juli 2016 bahwa 85 persen obat-obatan yang seharusnya tersedia di apotek swasta tidak tersedia atau sulit diperoleh dari 60 persen pada bulan November 2014 (HRW, 2016).

3.3 Dampak Krisis Ekonomi

3.3.1 Krisis Kemanusiaan

Kekacauan ekonomi memberikan berbagai permasalahan di Venezuela. Menurut banyak pengamat sedang terjadi krisis kemanusiaan di Venezuela karena tingginya angka kematian yang disebabkan pelayanan kesehatan yang buruk, kemiskinan dan kelaparan yang semakin banyak, angka kriminalitas yang semakin naik, serta banyaknya orang yang mengungsi ke negara lain. Pangeran Zeid Ra'ad Al Hussein Sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa Venezuela telah mengalami penurunan dramatis dalam menikmati hak ekonomi dan sosial, dengan kelaparan yang semakin meluas dan perawatan kesehatan yang memburuk secara tajam.

a. Kemiskinan Dan Kelaparan

Jatuhnya perekonomian di Venezuela menggiring negara tersebut pada tingginya angka kemiskinan dan kelaparan massal. Meningkatnya harga kebutuhan dan kelangkaan bahan pangan menjadi penyebab utama kelapara yang terjadi di Venezuela. Sebagian besar rakyat Venezuela yakni sebanyak 87 persen, menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai uang untuk membeli makanan yang layak. Persentase tersebut didasarkan pada penghitungan standar hidup layak yang dibuat oleh Simon Bolivar University.

Pemerintah berupaya membantu masyarakat agar mampu membeli kebutuhan mereka dengan mengeluarkan kebijakan menaikkan upah minimum.

Grafik 3.8: Upah Minimum Venezuela

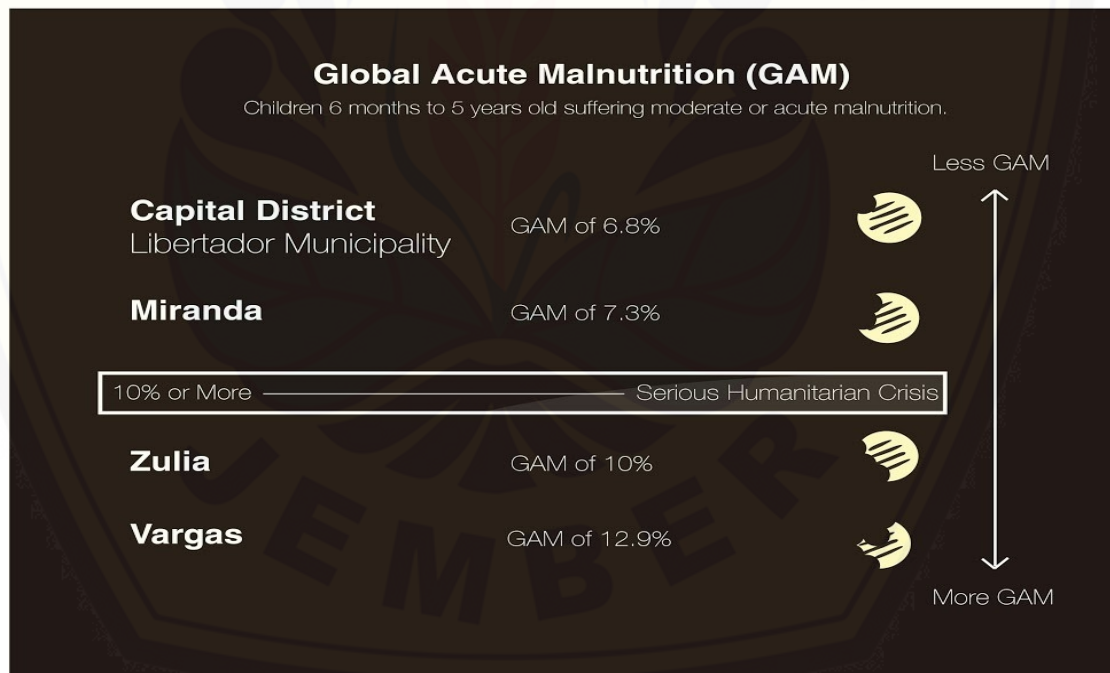


Sumber: tradingeconomics.com

Upah minimum Venezuela terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Tahun 2015 upah minimum di negara tersebut masih berada dibawah 50000 bolivar namun di tahun 2017 upah minimum sudah meningkat drastis mendekati 350000 bolivar. Angka yang sepiantas terlihat sangat tinggi meskipun sebenarnya hal tersebut tidak cukup membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka memang memiliki uang, akan tetapi tidak ada barang untuk dibeli di pasar.

Center for Documentation and Social Analysis melaporkan bahwa masyarakat Venezuela mengalokasikan 72 persen penghasilan bulanan mereka hanya untuk membeli bahan pangan. Diperkirakan saat ini upah minimum yang berlaku dan diterima hanyalah sebesar 20% dari biaya makan yang dibutuhkan, dengan asumsi 1 keluarga terdiri dari 5 anggota keluarga. Segala kesulitan terkait pangan pun menimbulkan gejolak di masyarakat. Dalam waktu dua minggu, ada sekitar 50 kerusuhan dan unjuk rasa terkait pangan. Krisis yang terjadi di Venezuela akibat kesalahan pengelolaan ekonomi dan harga minyak dunia yang jatuh (CFR, 2017).

Berdasarkan pengukuran GAM⁹ yang dilakukan di Venezuela, telah ditemukan 2 wilayah yang sudah berada diatas standar minimal dari krisis pangan. GAM adalah ukuran proporsi anak-anak berusia antara 6 bulan sampai 5 tahun yang menderita gizi buruk akut.



Gambar 3.1 GAM dari Venezuela. Sumber: (<https://www.caracaschronicles.com/2017/02/23/caritas-study-finds-childhood-hunger-racing-crisis-levels/>)

⁹GAM adalah salah satu indikator dasar untuk menilai tingkat keparahan krisis kemanusiaan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ketika GAM mencapai ambang 10%, krisis bisa dianggap "serius"; dan bila 15% anak-anak mengalami kekurangan gizi akut, krisis dapat dianggap "kritis".

Gambar diatas menunjukkan bahwa ada dua negara bagian yang telah dalam kondisi serius untuk tingkat krisis kemanusiaan yaitu Zulia yang memiliki nilai GAM 10 persen kemudian Vargas dengan angka yang lebih tinggi yaitu 12,9 persen. Hal tersebut menunjukkan besarnya tingkat kelaparan pada anak-anak di wilayah Venezuela (caracaschronicles, 2017).

Fakta-fakta yang meresahkan ini diidentifikasi melalui sistem pengawasan gizi yang dikenal dengan istilah SAMAN yang diajukan oleh Caritas Venezuela sebuah badan amal gereja katolik di Venezuela. Mereka melakukan sebuah penelitian sendiri karena lembaga resmi pemerintah yaitu National Institute of Nutrition yang bertugas untuk memberikan data resmi tentang pengawasan gizi nasional sudah lama tidak bekerja. Data terakhir yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut adalah pada tahun 2007 (caracaschronicles, 2017).

Berbagai upaya adaptasi dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi permasalahan kelaparan. Beberapa rumah tangga yang masih memiliki uang berusaha untuk melakukan penghematan dengan berhenti mengkonsumsi makanan yang mereka anggap mewah. Mengurangi jumlah makanan juga menjadi salah satu strategi yang dilakukan masyarakat di Venezuela dari tiga kali sehari menjadi dua kali atau bahkan sekali sehari. Strategi adaptasi yang lebih parah juga dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan menjual aset produktif untuk membeli makanan, mengemis agar anak mereka bisa makan, dan bahkan mengais makanan dari tempat sampah (Newman, 2017). Strategi-strategi darurat yang dilakukan oleh masyarakat Venezuela sangat mirip dengan apa yang biasanya terjadi di negara-negara yang dilanda perang (Toto, 2017).

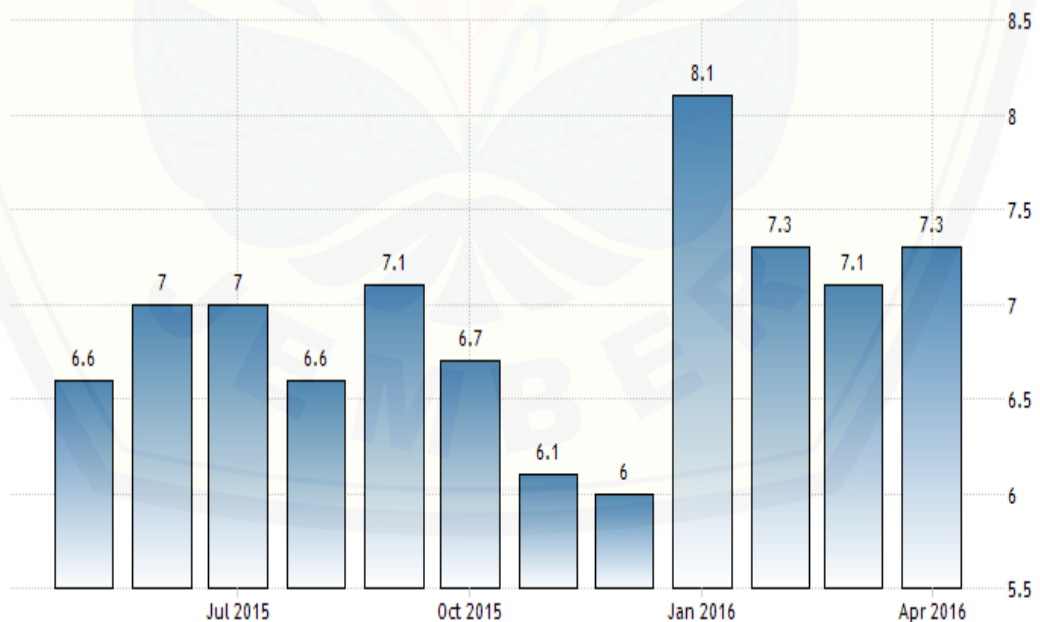
Dampak yang paling dilematis dari krisis ekonomi di Venezuela adalah beberapa orang tua yang menyerahkan anaknya secara cuma-cuma kepada orang lain. Salah satu contohnya adalah yang terjadi pada Oktober 2016, seorang warga Venezuela yang bernama Zulay Pulgar menawarkan anaknya yang berusia 6 tahun kepada tetangganya dikarenakan kesulitan menanggung beban ekonomi keluarga. Hal tersebut dia lakukan karena dianggap sebagai pilihan terbaik karena khawatir kesulitan ekonomi yang dialami mengakibatkan anak tersebut terjerumus dalam prostitusi, narkoba, bahkan mati kelaparan (Ulhaq, 2016).

Pemerintah tidak memiliki data pasti tentang jumlah orang tua yang memberikan anaknya secara cuma-cuma namun, menurut beberapa lembaga kemanusiaan yang ada di Venezuela memperkirakan terjadi peningkatan dalam kasus tersebut. Setiap harinya ada 12 orang tua di Carirubana yang ingin menyerahkan anak mereka secara cuma-cuma. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar 1 orang tua setiap harinya dengan motif utamanya adalah kekurangan ekonomi (Ulhaq, 2016).

b. Meningkatnya Pengangguran

Tingkat pengangguran berjalan selaras dengan kondisi perekonomian yang semakin memburuk. Banyaknya perusahaan yang berhenti beroperasi karena kekurangan modal membuat pengangguran semakin meningkat. Tingkat upah minimum yang dinilai belum mampu mencukupi kebutuhan dasar mereka juga menjadi salah satu faktor peningkatan angka pengangguran.

Grafik 3.9: Angka Pengangguran Venezuela



Sumber: tradingeconomics.com

Data diatas menunjukkan perjalanan tingkat pengangguran di Venezuela yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Angka tertinggi ditunjukkan

pada januari 2016 yang mencapai 8,1 persen dan angka terendah terlihat pada periode sebelumnya di akhir tahun 2015 yang hanya 6 persen.

Berdasarkan kondisi perekonomian yang belum juga membaik, IMF memprediksi akan terus terjadi peningkatan pengangguran di negara tersebut. Dalam laporan World Economic Outlook tahun 2017 yang dikeluarkan oleh IMF mereka menilai di tahun ini angka pengangguran sudah mencapai 26,4 persen dan diproyeksikan akan meningkat mencapai angka 29,8 persen di tahun 2018. Angka tersebut menjadi angka tertinggi di dunia menyusul Yunani di posisi ke dua (IMF, 2017).

c. Meningkatnya Kriminalitas

Permasalahan krisis ekonomi memang menjadi faktor yang paling sering mendorong terjadinya tindak kriminalitas dan hal tersebut sangat umum di berbagai negara. Venezuela mengalami peningkatan tingkat kriminalitas beberapa tahun terakhir mulai dari penjarahan hingga pembunuhan. Venezuela perlahan telah berubah menjadi salah satu negara dengan tingkat kejahatan tertinggi di dunia. Pada bulan April tahun 2016, dua warga AS Jeff Berweick dan Luke Rudkwocki berkunjung ke Caracas. Pertama kali tiba di bandara mereka telah melihat sebuah aksi perampokan dan pembunuhan.

Kriminalitas di Venezuela semakin meningkat, mulai dari perampokan, pembunuhan, dan penculikan sudah menjadi kabar berita yang tidak lagi mengejutkan. Kejahatan mulai banyak terjadi karena banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan makanan. Mereka mulai menjarah toko-toko dan bahkan melakukan pembunuhan untuk bertahan hidup. Hal tersebut terjadi hampir di semua wilayah di Venezuela. Kekacauan yang semakin meluas membuat pemerintah mulai menggunakan militer untuk mengendalikan kondisi. Upaya pemerintah untuk mengendalikan situasi dengan militer malah semakin memperparah kondisi yang ada di negara tersebut. Militer sering melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang mereka duga sebagai pelaku kejahatan. Mereka yang ditangkap kemudian disiksa untuk mengaku. Meskipun pada akhirnya beberapa dari mereka yang ditangkap dibebaskan tapi

tidak sedikit pula yang ditemukan menjadi mayat beberapa waktu kemudian (insighcrime, 2017).

Observatorium Kekerasan Venezuela (OVV) menjelaskan bahwa pada tahun 2016 Venezuela telah menjadi negara dengan angka pembunuhan terbesar kedua setelah El Salvador. Diperkirakan sekitar 28.479 kematian dengan kekerasan terjadi di Venezuela pada tahun 2016 dengan tingkat pembunuhan berada pada angka 91,8 per 100.000 penduduk. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 27.875 kematian dengan kekerasan, angka pembunuhan 90 kematian per 100.000 penduduk. Perhitungan tersebut juga termasuk kematian akibat konfrontasi yang melibatkan aparat keamanan, yang banyak diantaranya diduga melakukan pembunuhan di luar hukum (insighcrime, 2017).

d. Masyarakat Mulai Mengungsi

Kondisi Venezuela yang semakin mencekam membuat banyak warganya yang memutuskan untuk meminta mengungsi ke negara lain. Brazil dan Kolombia menjadi beberapa negara yang menjadi tujuan pengungsi Venezuela. Persediaan makanan di rak-rak toko yang kosong dan bahan pokok yang sulit diperoleh membuat banyak orang Venezuela menyeberang ke dua negara tersebut untuk membeli makanan pada awalnya, namun sebagian besar dari mereka tidak kembali dan memutuskan mengungsi disana (VOA Indonesia, 2017).

Permohonan suaka oleh warga Venezuela meningkat pada tahun 2017 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 ini hampir 50.000 orang telah mengajukan permohonan suaka. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun 2016 yang hanya 27.000 orang. Negara utama yang menjadi tujuan pencari suaka Venezuela tahun 2017 ini adalah Amerika Serikat (18.300), Brasil (12.960), Peru (4.453), Spanyol (4.300) dan Meksiko (1.044). Aruba, Kanada, Kolombia, Cile, Curacao, Kosta Rika, Ekuador dan Trinidad dan Tobago (UNHCR, 2017).

Menurut analisis UNHCR, angka diatas hanya mewakili sebagian kecil dari jumlah orang Venezuela yang mungkin membutuhkan perlindungan internasional dan melarikan diri dari negaranya karena kekerasan, ketidakamanan, dan juga ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hambatan

birokrasi, waktu tunggu yang lama dan biaya aplikasi yang tinggi, membuat banyak orang Venezuela memilih untuk tetap berada dalam situasi yang tidak teratur daripada menggunakan prosedur suaka atau migrasi resmi untuk mengatur tinggal mereka. Diperkirakan sebenarnya sudah ada 300.000 orang Venezuela di Kolombia, 40.000 di Trinidad dan Tobago dan 30.000 di Brasil (UNHCR, 2017).

Pencari suaka Venezuela pada tahun ini di Amerika Serikat menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara lain. Amerika Serikat menjadi salah satu tujuan dari pencari suaka Venezuela karena dianggap sebagai negara yang cukup memungkinkan untuk mereka memperbaiki kehidupannya. AS juga merupakan salah satu negara yang mengecam terjadinya kejahatan kemanusiaan di Venezuela.

Grafik 3.10: Pencari Suaka Venezuela Di AS



Sumber: <http://money.cnn.com/2017/05/23/news/economy/venezuela-us-asylum-refugees/index.html>

Dari grafik diatas terlihat tiga negara penyumbang terbesar pencari suaka di Amerika Serikat pada tahun 2017. Venezuela menjadi negara penyumbang tertinggi dari pencari suaka di Amerika Serikat dengan jumlah 14.525 orang.

China menjadi posisi kedua dengan jumlah 10.273 dan kemudian Mexico yang menyumbang pencari suaka sebesar 6.622.

3.3.2 Kekacauan Politik

Kondisi perpolitikan di Venezuela menjadi semakin kacau dengan sikap presiden Nicholas Maduro yang semakin otokratis ditengah-tengah krisis. Maduro menganggap bahwa kelompok oposisi merupakan dalang utama dibalik krisis ekonomi yang terjadi dengan dibantu oleh AS. Seolah takut jabatannya akan berhasil diambil alih oleh kelompok oposisi, Maduro mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memicu kecaman dari berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Majelis Nasional yang dikuasai oleh oposisi berusaha untuk di lemahkan oleh Maduro. Pada bulan September 2016, otoritas pemilihan Venezuela, yang dianggap setia kepada Maduro, memerintahkan oposisi untuk menunda sebuah kampanye referendum, yang memicu protes dan kecaman internasional. Mahkamah Agung juga menghilangkan hak Majelis Nasional untuk mengawasi ekonomi dan membatalkan sebuah undang-undang yang akan membebaskan delapan puluh tahanan politik, termasuk pemimpin oposisi Leopoldo Lopez (Ellsworth, 2017).

Cabang kehakiman dibawah kuasa Maduro secara singkat membubarkan Majelis Nasional Pada bulan Maret 2017. Protespun banyak berdatangan baik dalam negeri maupun dari internasional karena hal tersebut dianggap sebuah penghinaan terhadap demokrasi. Pengadilanpun kemudian merevisi keputusannya beberapa hari kemudian. Pemerintah juga melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh oposisi dengan berbagai macam tuduhan dan juga melarang politisi oposisi Henrique Capriles, yang kalah tipis dari Maduro dalam pemilihan presiden 2013, untuk berkecimpung di dunia politik selama lima belas tahun (Ellsworth, 2017).

Kebijakan paling kontroversial yang dikeluarkan Maduro adalah mengadakan pemilihan majelis konstituen baru dengan wewenang menyusun ulang undang-undang dan konstitusi negara. Kelompok oposisi sendiri memboikot

pemilihan ini sehingga membuat kursi yang ada di majelis tersebut yaitu sebanyak 545, semuanya dimenangkan oleh pendukung Maduro. Istri dari Nicholas maduropun juga menjadi bagian dari majelis konstitusi yang baru dibentuk tersebut (Ellsworth, 2017). Majelis konstitusi yang baru tersebut menggeser kekuasaan dari majelis konstitusi yang sudah ada bahkan memiliki wewenang yang lebih besar. Pemilihan ini mendapat kecaman dari banyak pihak terutama AS karena dianggap mencederai demokrasi.

Kelompok oposisi dan pendukungnya yang tidak terima terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut berusaha memprotes dengan melakukan demonstrasi. Ratusan korbanpun berjatuh dalam aksi demonstrasi tersebut akibat bentrokan dengan anggota polisi. Komite perlindungan wartawan juga mengatakan bahwa pasukan keamanan pemerintah telah menyerang wartawan, dan beberapa wartawan asing telah ditahan (CPJ, 2016). Kondisi di negara tersebut semakin menjadi tidak kondusif ditengah ganasnya pemerintah, hingga pada tahun 2017 ini Freedom House memberi predikat sebagai “negara tidak bebas” kepada Venezuela (Brockwehl, 2017).

BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan bahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa ketergantungan terhadap satu sumber pendanaan yaitu minyak untuk semua program-program sosial dari rezim sosialis di Venezuela sangat rentan terhadap kondisi ekonomi dan politik dalam negerinya. Harga minyak yang fluktuatif menjadi masalah utama untuk sumber pendapatan negara. Ketika harga minyak melonjak mereka akan mendapatkan pendanaan yang besar namun, ketika harga minyak turun mereka akan merasakan dampak yang luar biasa.

Dalam bidang ekonomi, Krisis yang terjadi saat ini membuktikan bahwa sebenarnya rezim sosialis Venezuela sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Pendapatan negara mulai menurun drastis karena harga minyak yang anjlok, sehingga mereka kesulitan mendapatkan modal untuk terus melaksanakan program-program sosialnya. Menurunnya pendapatan negara tersebut mendorong terjadinya defisit anggaran pemerintah yang kemudian membuat mereka kembali mencari pinjaman untuk menutupi kekurangan modal dalam negerinya. Hutang yang semakin meningkat dan harga minyak dunia yang belum membaik membuat perekonomian Venezuela semakin tidak stabil. Cadangan devisa Venezuelapun semakin menipis dan tidak sebanding dengan jumlah hutang yang mereka miliki.

Dalam bidang politik, telah terjadi perpecahan di internal pemerintahan rezim sosialis yang membuat terjadinya pergantian posisi dari beberapa pejabat. Namun, dasar pertimbangan penunjukan pejabat baru yang lebih berdasarkan pada kesetiaan semakin memperburuk kondisi krisis yang terjadi. Tekanan juga terus berdatangan dari berbagai pihak terutama dari kelompok oposisi yang memanfaatkan isu krisis ekonomi. Protes bermunculan di berbagai daerah yang diinisiasi oleh kelompok mahasiswa untuk menuntut perbaikan ekonomi. Dukungan dari militer yang digunakan pemerintah untuk mengontrol protes yang terjadi justru semakin memperluas isu yang dibawa dalam tuntutan para demonstran yaitu adanya demokrasi di Venezuela.

Pemerintah semakin tertekan setelah beberapa LSM mengeluarkan laporan tentang kondisi di Venezuela yang dikategorikan sebagai krisis kemanusiaan yang

kemudian memancing kecaman dari dunia internasional. Mereka menuntut agar pemerintah Venezuela segera menyelesaikan krisis yang terjadi di negaranya. Beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Venezuela yang pada awalnya mendukung pemerintahan sosialis seperti Brazil, Kolombia, dan Guyana juga mulai beralih untuk mengecam kondisi krisis yang semakin parah. Negara-negara seolah takut dampak krisis yang terjadi di Venezuela akan berimbas kepada negara mereka. Tidak hanya berupa kecaman, beberapa negara bahkan memberikan sanksi tegas terhadap Venezuela. Mitra utama Venezuela yaitu Kuba, China, dan Rusia hingga saat ini masih menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan rezim sosialis. Namun, bantuan pendanaan yang menjadi kebutuhan utama Venezuela untuk membangun kembali perekonomiannya justru semakin berkurang dari mereka.

Berdasarkan kecenderungan tersebut, rezim sosialis di Venezuela saat ini sedang dalam keadaan terjepit dan berpeluang besar untuk runtuh jika pemerintah tidak mampu segera menyelesaikan permasalahan ekonomi yang sedang terjadi. Dengan runtuhnya rezim sosialis, nantinya akan terbuka kemungkinan untuk terjadinya demokratisasi di Venezuela.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Auty, R. 1993. *Sustaining Development in Mineral Economies: the Resource Curse Thesis*. London & New York: Routledge.
- Gie, L. 1979. *Ilmu Politik: Suatu pembahasan tentang pengertian, kedudukan, Lingkup dan Metodologi*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Haggard, S., dan Kaufman. 1995. *Political Economy of Democratic Transitions*. Princeton: Princeton University Press.
- Linan, A.P., dan Scott, M. 2014. *2 - A Theory of Regime Survival and Fall*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Linz, J., dan A. Stepan. 1978. *The Breakdown of Democratic Regimes*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Mas'ood, M. 2014. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Michael, T.H. dan J. C. Frederik. 2005. *The History of Venezuela*. London: Greenwood Press.
- Monaldi, F. 2015. *Impact Of The Decline in Oil Prices on Venezuela*. New York: Columbia University Press.
- Nurani Soyomukti. (2007). *Revolusi Bolivarian Hugo Chavez dan Politik Radikal*. Yogyakarta: Resist Book.
- Pertiwi. 2009. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Tugu Publisher.
- Sutrisno, H. 1984. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Trinkunas. H. A. 2017. *The Venezuela Crisis: The Malicious Influence of State and Criminal Actors*. Stanford: Stanford University.
- Willrich, M. 1978. *Energy and World Politics*. New York: The Free Press.
- Wright, J. 2010. *Exit During Crisis: How Openness, Migration, And Economic Crisis Affect Democratization*. Kellogg Institute.

Jurnal dan Paper

- Anselmi, M. 2017. Post-populism in Latin America: On Venezuela after Cha'vez. *Chin. Polit. Sci. Rev.* 2: 410–426, DOI 10.1007/s41111-017-0066-y.

- Blanchard, J. M. F. 2016. Political Aspects Of Chinese Investment In Latin America. *Revista Tempo Do Mundo*, 2 (2): 35-50.
- Castañeda, J. G. 2006. Latin America's Left Turn. *Foreign Affairs*, 85 (3): 28-43.
- Helliwell, J. Richard, L, dan Jeffrey, D.S. 2017. World Happiness Report 2017.
- IMF. 2017. World Economic Outlook October 2017. ISSN 0256-6877 (print) | ISSN 1564-5215 (online). Pp. 1-304.
- Maya, M.L. 2014. Venezuela: The Political Crisis of Post-Chavismo. *Social Justice*, 40 (4): 68-87.
- Purdy, M. R. 2015. Participatory Populism: Theory and Evidence from Bolivarian Venezuela. *Political Research Quarterly*, 68 (3): 415-427.
- Sitenko, A. 2016. Latin American vector in Russia's Foreign Policy: Identities and interests in the Russian-Venezuelan Partnership. *Politics in Central Europe*, 12 (1): 37-57. DOI: 10.1515/pce-2016-0003.
- Torre, C. 2013. In the Name of the People: Democratization, Popular Organizations, and Populism in Venezuela, Bolivia, and Ecuador. *European Review of Latin American and Caribbean Studies / Revista Europea de Estudios Latino americanos y del Caribe*, 95: 27-48.
- Weyland, K. 2004. Assessing Latin American Neoliberalism: Introduction to a Debate. *Latin American Research Review*, 39 (3): 143-149.
- Wilpert, G. 2011. How Venezuela's Right Discovered Human Rights. *NACLA Report on the Americas*, 44 (5): 29-32.

Skripsi

- Andrianto, A. 2012. kebijakan-Kebijakan Pemerintahan Hugo Chavez Di Venezuela (1999-2011). Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Internet

- Abadi, M. A. 2017. Caritas Study finds Childhood Hunger Racing to Crisis Levels. <https://www.caracaschronicles.com/2017/02/23/caritas-study-finds-childhood-hunger-racing-crisis-levels/> [Diakses pada 2 Oktober 2017]
- Al-Jazeera. 2015. Venezuela opposition wins majority in legislature. <http://www.aljazeera.com/news/2015/12/opposition-wins-majority->

venezuela-legislature-151207051359021.html [Diakses pada 9 Oktober 2017]]

Al-jazeera. 2017. Luisa Ortega 'fearing for her life' flees to Colombia. <http://www.aljazeera.com/news/2017/08/luisa-ortega-fearing-life-flees-colombia-170819053144164.html> [Diakses pada 1 November 2017]

Al-jazeera. 2017. Students protest against constitutional assembly plan. <http://www.aljazeera.com/news/2017/06/students-protest-constitutional-assembly-plan-170627075547446.html> [Diakses pada 5 Oktober 2017]

Almagro. L. 2016. Report of the Secretary General to the Permanent Council on the Situation in Venezuela. <http://www.oas.org/documents/eng/press/OSG-243.en.pdf>. [Diakses pada 5 Oktober 2017]

Almagro. L. 2017. Report of the Secretary General to the Permanent Council on the Situation in Venezuela. <http://www.oas.org/documents/eng/press/TERCER-INFORME-VENEZUELA-ENGLISH-Final-signed.pdf> [Diakses pada 1 November 2017]

Almagro.L. 2017. Secretary General Presents Updated Report on Venezuela to the Permanent Council. http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-014/17. [Diakses pada 5 Oktober 2017]

Bahar. D. dan H. Trinkunas. 2016. Dim prospects for dialogue in Venezuela, <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2016/06/22/dim-prospects-for-dialogue-in-venezuela/>. [Diakses pada 5 Oktober 2017]

BBC Indonesia. 2017. Mengapa Venezuela diguncang demonstrasi dalam satu bulan ini?. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39804103> [Diakses pada 12 juni 2017]

BBC. 2017. Venezuela elige la Asamblea Nacional Constituyente en controvertidas elecciones con el 41,53% de participación popular, según el Consejo Nacional Electoral. <http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40772815> [Diakses pada 29 Oktober 2017]

Bloomberg. 2010. Venezuela Pays Off IMF, World Bank Debt, Finance Minister Says. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&refer=latin_america&sid=awr5d6zntU.Q. [Diakses pada 9 Mei 2017]

- Brito, R., dan C. Pons. 2017. Venezuela ex-prosecutor says she has evidence of Maduro corruption. <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-idUSKCN1B329R> [Diakses pada 15 Oktober 2017]
- Brockwehl, A. 2017. Venezuela Sheds Its Democratic Façade. <https://freedomhouse.org/blog/venezuela-sheds-its-democratic-façade> [Diakses pada 15 Oktober 2017]
- Brussels. 2017. EU 'set to impose' arms embargo on Venezuela. <http://www.gulf-times.com/story/570467/EU-set-to-impose-arms-embargo-on-Venezuela>. [Diakses pada 15 Oktober 2017]
- BTI, 2016. Venezuela Country Report. <http://www.bti-project.org>. [Diakses pada 10 Oktober 2017]
- Buitrago, D. 2017. Venezuela economy to shrink 7-10 percent this year: business chamber. <https://www.reuters.com/article/us-latam-summit-fedecamaras/venezuela-economy-to-shrink-7-10-percent-this-year-business-chamber-idUSKBN1AP239> [Diakses pada 15 Oktober 2017]
- Buitrago, D. 2017. Venezuelan business leader slams Maduro's congress plan. <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-business/venezuelan-business-leader-slams-maduros-congress-plan-idUSKBN1A42G8> [Diakses pada 15 Oktober 2017]
- Cartaya, Rolando. 2016. Cuba sofre "shock venezolano" por lentitud de reformas. <https://www.martinoticias.com/a/cuba-sufre-shock-venezolano-lentitud-reformas-internas-economista/126821.html> [Diakses pada 15 Oktober 2017]
- Casey, N. 2016. Venezuela's Justices Support More Power for the President. <https://www.nytimes.com/2016/02/13/world/americas/court-ruling-in-venezuela-prompts-accusation-of-an-illegal-power-grab.html> [Diakses pada 5 Oktober 2017]
- Ceicdata. 2017. Venezuela Wage Index: Private Sector: Electricity, Gas and Water Supply <https://www.ceicdata.com/indicator/venezuela/data/wage-index-private-sector-electricity-gas-and-water-supply> [Diakses pada 15 Oktober 2017]
- Ceicdata. 2017. Venezuela Wage Index: Private Sector: Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles, Personal and Household Goods <https://www.ceicdata.com/indicator/venezuela/data/wage-index-private-sector-wholesale-and-retail-trade-repair-of-motor-vehicles-personal-and-household-goods> [Diakses pada 5 Oktober 2017]

- CNE. 2013. Resultado Presidencial 2013. http://www.cne.gob.ve/resultado_presidencial_2013/r/1/reg_000000.html. [Diakses pada 5 Oktober 2017]
- CPJ. 2016. Journalists covering Venezuela tension face violence, obstruction. <https://cpj.org/2016/10/journalists-covering-venezuela-tensions-face-viole.php> [Diakses pada 7 Oktober 2017]
- Economist. 2014. Inside the barrios: Support among the poor for the government of Nicolás Maduro is conditional. <https://www.economist.com/news/americas/21599382-support-among-poor-government-nicol-s-maduro-conditional-inside-barrios> [Diakses pada 15 Oktober 2017]
- Ellsworth, B. 2017. Implications of Venezuela's proposed foreign debt restructuring. <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-bonds-q-a/implications-of-venezuelas-proposed-foreign-debt-restructuring-idUSKBN1D3250> [Diakses pada 20 Oktober 2017]
- Ellsworth, B. 2017. Venezuela's Maduro celebrates new assembly, mocks U.S. criticism. <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics/venezuelas-maduro-celebrates-new-assembly-mocks-u-s-criticism-idUSKBN1AE0JO> [Diakses pada 15 Oktober 2017]
- Felter, C., dan D. Renwick . 2017. Venezuela in Crisis. <https://www.cfr.org/background/venezuela-crisis> [Diakses pada 15 Oktober 2017]
- Francisco, T. 2017. Venezuela's hunger crisis is for real. https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/06/01/venezuelas-hunger-crisis-is-for-real/?utm_term=.c79dc4322177 [Diakses pada 5 Oktober 2017]
- Gillespie, P. 2017. China is cutting off cash to Venezuela. <http://money.cnn.com/2016/09/30/news/economy/china-venezuela-finance/index.html>. [Diakses pada 1 Oktober 2017]
- Gillespie, P. 2017. Thousands of Venezuelans fleeing to the US. <http://money.cnn.com/2017/05/23/news/economy/venezuela-us-asylum-refugees/index.html> [Diakses pada 16 Oktober 2017]
- Gutierrez, M. 2017. 96% de venezolanos están en contra de las protestas. <http://www.notitarde.com/96-de-venezolanos-estan-en-contras-de-las-protestas-portada/2017/07/01/1064569/> [Diakses pada 18 Oktober 2017]

- Hardoko, E. 2016. Warga Venezuela Antre Tukarkan Uang 100 Bolivar yang Akan Dihapus. <http://internasional.kompas.com/read/2016/12/16/09463861/warga.venezuela.antre.tukarkan.uang.100.bolivar.yang.akan.dihapus> [Diakses pada 1 November 2017]
- Hornby, L., dan Schipani. A. 2016. China seeks to renegotiate Venezuela loans, Beijing's envoys seek assurances from opposition on debt in case president falls. <https://www.ft.com/content/18169fbe-33da-11e6-bda0-04585c31b153> [Diakses pada 1 November 2017]
- Human Right Watch. 2016. Venezuela's Humanitarian Crisis Severe Medical and Food Shortages, Inadequate and Repressive Government Response. Human rights watch <https://www.hrw.org/report/2016/10/24/venezuelas-humanitarian-crisis/severe-medical-and-food-shortages-inadequate-and> [Diakses pada 1 November 2017]
- Insight Crime. 2017. Venezuela Set for Murderous 2017. <http://www.insightcrime.org/news-briefs/venezuela-set-for-murderous-2017> [Diakses pada 1 November 2017]
- International. 2017. Statement of the third meeting of the Lima Group on the situation in Venezuela. <http://www.international.gc.ca/americas-ameriques/statement-lima-declaration-2017-10-26.aspx?lang=eng> [Diakses pada 1 November 2017]
- Ishmael, O. 2007. *South American Resistance to IMF and World Bank*. http://www.guyanajournal.com/SA_IMF_WorldBank.html. [Diakses pada 9 Mei 2017]
- Konstitusi Bolivarian. 1999. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. pdba.georgetown.edu/Parties/Venezuela/Leyes/constitucion.pdf [Diakses pada 2 September 2017]
- Leatherby, L. 2017. Venezuela's economic and political crisis in charts. <https://www.ft.com/content/0228db48-6e4b-11e7-bfeb-33fe0c5b7eaa> [Diakses pada 1 November 2017]
- Margolis. M. 2016. Mercosur Turns Its Back on a Diminished Venezuela. <https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-12-09/mercosur-turns-its-back-on-a-diminished-venezuela> [Diakses pada 3 November 2017]
- Miguel, G. 2017. Protestas pierden apoyo según encuesta de la UCAB. <http://www.notitarde.com/protestas-pierden-apoyo-segun-encuesta-de-la-ucab/pais/2017/07/01/1064488/> [Diakses pada 4 November 2017]

- Nauert, H. 2017. Venezuela's Illegitimate National Constituent Assembly. Washington DC. <https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/08/273024.htm> [Diakses pada 5 November 2017]
- Newman, L. 2017. Venezuelan families scavenge for food to survive hunger. <http://www.aljazeera.com/news/2017/09/venezuelan-families-scavenge-food-survive-hunger-170925165215474.html> [Diakses pada 1 November 2017]
- Newman, W. 2013. Court Rejects Vote Challenge in Venezuela. <http://www.nytimes.com/2013/08/08/world/americas/venezuelan-court-rejects-challenge-to-presidential-election-results.html> [Diakses pada 12 Oktober 2017]
- Nicholas, C. 2016. In a Brutal Year in Venezuela, Even Crime Fighters Are Killers <https://www.nytimes.com/2016/12/30/world/americas/venezuela-violence.html> [Diakses pada 1 November 2017]
- NRGI Reader. 2015. The Resource Curse: The Political and Economic Challenges of Natural Resource Wealth. https://resourcegovernance.org/sites/default/files/nrgi_ResourceCurse.pdf [Diakses pada 10 Mei 2017]
- OAS. 2016. Secretary General Invoked Democratic Charter and Convened Permanent Council on Venezuela. <http://www.oas.org/documents/eng/press/OSG-243.en.pdf> [Diakses pada 1 November 2017]
- OAS. 2017. Denunciation of a Dictatorial Regime's Consolidation in Venezuela: Presented by Secretary General Luis Almagro to the Permanent Council. <http://www.oas.org/documents/eng/press/OSG-445-CUARTO-INFORME-venezuela-English.pdf>. [Diakses pada 1 November 2017]
- Oré, D., dan E. China. 2017. Venezuela opposition challenges Maduro with unofficial referendum. <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics/venezuela-opposition-challenges-maduro-with-unofficial-referendum-idUSKBN19O1M0> [Diakses pada 16 Oktober 2017]
- Parraga, M. dan M. Frank. 2017. Exclusive: Venezuela oil exports to Cuba drop, energy shortages worsen. <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-cuba-oil-exclusive/exclusive-venezuela-oil-exports-to-cuba-drop-energy-shortages-worsen-idUSKBN19Y183> [Diakses pada 27 Oktober 2017]
- Parraga, M dan B. Ellsworth. 2017. Venezuela falls behind on oil-for-loan deals with China, Russia. <http://www.reuters.com/article/us-venezuela-oil->

insight/venezuela-falls-behind-on-oil-for-loan-deals-with-china-russia-idUSKBN15O2BC [Diakses pada 2 November 2017]

Patricia, L., dan C. Saraiva. 2017. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-10/imf-sees-venezuelan-inflation-rate-rising-beyond-2-300-in-2018> [Diakses pada 23 November 2017]

Peters, G., dan J. T. Woolley. 2015. The American Presidency Project: *Executive Order 13692—Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela*. <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=109730> [Diakses pada 5 November 2017]

Pons, C., dan B. Ellsworth. 2017. Venezuela opposition says 7 million vote in anti-Maduro poll. <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics/venezuela-opposition-says-7-million-vote-in-anti-maduro-poll-idUSKBN1A104O> [Diakses pada 28 Oktober 2017]

Porzecanski, K., P. Laya., B. Bartenstein., dan C. Jenkins. 2017. Venezuela's Debt Negotiator Calls Meeting and Adds to Confusion. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-03/venezuela-is-seeking-debt-relief-and-confusing-its-bondholders> [Diakses pada 12 Oktober 2017]

Porzecanski, K. 2017. How Venezuela Bondholders Finally Ran Out of Time <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-03/how-venezuela-bondholders-finally-ran-out-of-time-quicktake-q-a> [Diakses pada 12 Oktober 2017]

Rakhma, S.D.S. 2016. Ekonomi Jatuh, Hampir 90 Persen Warga Venezuela Tak Mampu Beli Bahan Pangan. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/21/112300226/ekonomi.jatuh.hampir.90.persen.warga.venezuela.tak.mampu.beli.bahan.pangan> [Diakses pada 9 Mei 2017]

Rakhma, S.D.S. 2016. *Ekonomi Jatuh, Hampir 90 Persen Warga Venezuela Tak Mampu Beli Bahan Pangan*. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/21/112300226/ekonomi.jatuh.hampir.90.persen.warga.venezuela.tak.mampu.beli.bahan.pangan> [Diakses pada 9 Mei 2017].

Rathbone, J. P. 2017. Luisa Ortega, Venezuela's rebel with a democratic cause. <https://www.ft.com/content/070c14fe-6d6a-11e7-b9c7-15af748b60d0> [Diakses pada 2 November 2017]

- Reuters staff. 2017. Cuban trade with Venezuela plunges over two years. <https://www.reuters.com/article/us-cuba-venezuela-trade/cuban-trade-with-venezuela-plunges-over-two-years-idUSKCN1AV23C?il=0> [Diakses pada 6 November 2017]
- Romero, A. 2017. Reporte De Represion Octubre 2017. <https://foropenal.com/2017/11/09/reportederepresionoctubre-2017/> [Diakses pada 22 Oktober 2017]
- Romero, S. 2012. With Brazil as Advocate, Venezuela Joins Trade Bloc. <http://www.nytimes.com/2012/08/01/world/americas/mercosur-trade-bloc-admits-venezuela-as-full-member.html> [Diakses pada 3 November 2017]
- Seelke. C. R. dan Nelson. R.M. 2017. Venezuela: Background and U.S. Policy. <https://fas.org/sgp/crs/row/R44841.pdf> [Diakses pada 25 Oktober 2017]
- Shetty. S. 2015. Amnesty International Annual Report 2014/2015. <https://www.amnesty.org/en/latest/research/2015/02/annual-report-201415/> [Diakses Pada 17 November 2017]
- Sullivan. M. P. 2017. Venezuela: Isu untuk Kongres, 2013-2016. <https://fas.org/sgp/crs/row/R43239.pdf> [Diakses pada 2 November 2017]
- Theodore, C. 2017. Venezuela: Socialism, Hyperinflation, and Economic Collapse <https://www.aier.org/research/venezuela-socialism-hyperinflation-and-economic-collapse> [Diakses pada 2 November 2017]
- Torres. N.G. 2017. After Maduro's secret trip to Cuba, opposition leader want to know: 'Why did he go?'. <http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article167768857.html>. [Diakses pada 20 November 2017]
- Trading Economics. 2017. Venezuela Government Budget. <https://tradingeconomics.com/venezuela/government-budget> [Diakses pada 16 November 2017]
- Trading Economics. 2017. Venezuela-external debt. <https://id.tradingeconomics.com/venezuela/external-debt> [Diakses pada 16 November 2017]
- Transparency. 2017. Venezuela. <https://www.transparency.org/country/VEN> [Diakses pada 13 November 2017]
- Ulhaq, M. F. 2016. Krisis ekonomi: orang tua tawarkan anaknya secara gratis di Venezuela. <https://m.detik.com/news/internasional/3372655/krisis-ekonomi->

orang-tua-tawarkan-anaknya-secara-dratis-di-venezuela [Diakses pada 6 Oktober 2017]

Ulmer, A., D. Lawder. 2017. Trump slaps sanctions on Venezuela; Maduro sees effort to force default. <https://www.reuters.com/article/us-usa-venezuela-sanctions/trump-slaps-sanctions-on-venezuela-maduro-sees-effort-to-force-default-idUSKCN1B5216> [Diakses pada 17 Oktober 2017]

VOA Indonesia. 2017. Pence Bertemu Para Pengungsi Venezuela di Kolombia. <https://www.voaindonesia.com/a/pence-bertemu-para-pengungsi-venezuela-di-kolombia/3986021.html> [Diakses pada 2 November 2017]

Waters, Rob. 2017. The Cuban hustle: Doctors drive cabs and work abroad to make up for meager pay. <https://www.statnews.com/2017/02/08/cuba-doctors-meager-pay/> [Diakses pada 4 November 2017]

Watts, J. dan V. Lopez. 2013. Venezuela begins seven days of mourning after death of Hugo Chávez. <https://www.theguardian.com/world/2013/mar/05/hugo-chavez-dies-cuba> [Diakses pada 2 November 2017]

White House. 2017. Presidential Executive Order on Imposing Sanctions with Respect to the Situation in Venezuela. <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/25/presidential-executive-order-imposing-sanctions-respect-situation>. [Diakses pada 6 November 2017]

White House. 2017. Presidential Memorandum for the Secretary of State. <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/09/13/presidential-memorandum-secretary-state> [Diakses pada 2 November 2017]

White House. 2017. Statement from President Donald J. Trump. <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/07/17/statement-president-donald-j-trump> [Diakses pada 2 November 2017]

World View. 2017. Mexico Sees an Opportunity in Venezuela's Struggles. <https://worldview.stratfor.com/article/mexico-sees-opportunity-venezuelas-struggles> [Diakses pada 1 November 2017]

Zerpa, F. 2017. Inflation Roars Back in Venezuela. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-31/after-mysteriously-vanishing-inflation-roars-back-in-venezuela> [Diakses pada 2 November 2017]